

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2019



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit Nomor 40 Mataram Kode Pos 83010 Telepon 0370-621356 Faximili 0370-625766

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Laporan ini memuat semua pencapaian kinerja Perangkat Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2019.

Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dimana Dinas ESDM diberikan amanah untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Setidaknya ada dua misi yang diemban oleh Dinas yaitu Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Kedua misi tersebut mempunyai sasaran pada Misi 4 berupa meningkatnya pengelolaan *geopark* dengan indikator sasaran (IKK) persentase geosite yang tertata, serta sasaran pada Misi 5 berupa terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran (IKK) rasio elektrifikasi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini masih memiliki keterbatasan dalam penyajiannya, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh segenap sumber daya yang dimiliki Dinas ESDM Provinsi NTB. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dinas dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Provinsi NTB.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT, Amin.

Mataram, Januari 2020
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Operasional.....	4
C. Kedudukan, Tupoksi dan Susunan Organisasi	6
D. Sistematika Penyusunan Laporan	10
BAB II Perencanaan Kinerja	11
A. Perencanaan Kinerja	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Kinerja	23
1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2019	23
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun 2019.....	29
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target akhir Renstra 2019-2023.....	33
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target nasional.....	41
5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi.....	43
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	47
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.....	49
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV Penutup	56
Lampiran-lampiran	58
1. Rencana Strategis SKPD	
2. Indikator Kinerja Utama SKPD	
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2019	
6. Laporan Pendukung LKjIP Tahun 2019	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Provinsi NTB Tahun 2019 ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010.....	3
Tabel 1.2	Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2019.....	7
Tabel 2.1	Misi yang harus diimplementasikan Dinas ESDM dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur.....	12
Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran Dinas ESDM Tahun 2019-2023	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2019	19
Tabel 2.5	Program/Kegiatan, Anggaran dalam perjanjian kinerja Tahun 2019	20
Tabel 3.1	Capaian indikator kinerja saaran RPJMD tahun 2019-2023 yang mendukung IKU Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019.....	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2019 berdasarkan Target Renstra 209-2023	24
Tabel 3.3	Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019	28
Tabel 3.4	Perbandingan capaian IKK RPJMD 2019-2023 yang mendukung IKU Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018-2019	28
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019 Terhadap Tahun 2018	29
Tabel 3.6	Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023	34
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra	35
Tabel 3.8	Perkembangan Neraca Daya Listrik Tahun 2017-2019	45
Tabel 3.9	Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2017-2019	48
Tabel 3.10	Rekapitulasi Belanja Melalui APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan SKPD	51
	ESDM Tahun 2018-2019	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016	9
Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2014-2019	41
Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2014-2019	34
Gambar 3.3 Sebaran Capaian Rasio elektrifikasi Nasional Tahun 2019 ...	42

RINGKASAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut dibagi ke dalam beberapa Sub Urusan Pemerintahan diantaranya Sub Urusan Geolog, Sub Urusan Mineral dan Batubara, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dan Sub Urusan Ketenagalistrikan

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang menjadi tugas Dinas ESDM Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholder* pelaku pembangunan. Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan yang terjadi di Provinsi NTB sesuai kewenangannya, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah dalam rangka mewujudkan “Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” yang menunjukkan satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KjIP) Tahun 2019 ini menyajikan informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.

Selama tahun 2019 Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.360.068.700,50 telah berupaya meningkatkan terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin berupa listrik dan air bersih melalui peningkatan Rasio Elektrifikasi dan menambah cakupan air bersih masyarakat melalui pemanfaatan air tanah.

Indikator Kinerja Utama dalam Rentra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah Rasio Elektrifikasi dan mendukung cakupan air bersih. Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Rasio Elektrifikasi masuk dalam Indikator Sasaran (IKK) pada misi 5 dengan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin. Adapun indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	%	94,46	99,55	105,39
2.	Cakupan Air Bersih (pendukung) *)	KK	2.040	2.125	104,17
Rata-rata capaian kinerja					104,78

*) Dinas ESDM berkontribusi sebanyak 2.125 KK untuk mendukung kinerja capaian cakupan air bersih.

Selain capaian Indikator Kinerja Utama Renstra sebesar 104,78%, terdapat capaian indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program dan indikator kinerja keuangan yang tertuang dalam target Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2019 menunjukkan nilai prosentase pencapaian akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

- Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 110,75%;
- Pencapaian Kinerja Program sebesar 109,42%;
- Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 91,66%.

Selain capaian tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya terkait permasalahan sub urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara serta sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan. Kedua permasalahan ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang geologi, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan. Sedangkan sub urusan bidang minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas ESDM Provinsi NTB juga bertugas untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTB untuk menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan lebih intensif untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di berbagai sektor. Sesuai dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Dinas ESDM Provinsi NTB diberi tanggungjawab untuk mendukung Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dan Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Isu strategis terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019 sebagai penjabaran Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin terhadap listrik dan air bersih melalui peningkatan Rasio Elektrifikasi dan cakupan layanan air bersih;
2. Pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan meningkatkan bauran energi untuk mencapai target rencana umum energi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dengan memberikan nilai tambah, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan penerapan “*good mining practices*”;

4. Perlindungan terhadap situs geologi dalam rangka pengelolaan geopark.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas ESDM telah mengikhtikarkan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi, Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan kebijaksanaan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan sebagai program utama dengan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin (melalui listrik dan air bersih). Sasaran tersebut diterjemahkan melalui peningkatan Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) yang merupakan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Peningkatan capaian Rasio Elektrifikasi dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan dan memperkuat ketahanan energi daerah melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dilaksanakan melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan layanan listrik. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah dengan pembangunan sumur bor pada daerah-daerah rawan kekeringan.

Rasio Elektrifikasi adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas ESDM Taun 2019-2023. Sedangkan peningkatan cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah, dimana Dinas ESDM berkontribusi mendukung sasaran kebijakan tersebut bersama SKPD terkait lainnya. Cakupan air bersih merupakan rasio jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih dibandingkan dengan jumlah total penduduk. Besar kontribusi dinyatakan dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapat layanan air bersih pada daerah dimana sumur bor dibangun.

Pada sub urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara, pembangunan sektor ESDM diarahkan untuk mampu menghasilkan nilai tambah mineral, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk itu Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk mendorong segera

direalisasikannya industrialisasi di bidang pertambangan melalui pembangunan smelter (pengolahan dan pemurnian logam) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sejak tahun 2000 peran sektor ESDM melalui pertambangan dan pengalihan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB sangat signifikan, hal ini terjadi sejak adanya industri pertambangan mineral logam hingga puncaknya pada tahun 2012. Pasca tahun 2012 hingga saat ini kontribusi sektor pertambangan dan pengalihan semakin menurun sejalan dengan menurunnya produksi pertambangan mineral logam dan tren menurunnya harga logam secara global. Dengan segera direalisasikannya industrialisasi usaha pertambangan melalui pembangunan smelter diharapkan dapat meningkatkan peran sektor ESDM dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Peran sektor ESDM tahun 2019 dapat dilihat dari PDRB yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTB Tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (dalam Juta rupiah)

LAPANGAN USAHA		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,326,507.36	23.49	8,240,776.28	24.73	7,919,844.20	23.30	-	-
B	Pertambangan dan Pengalihan	4,490,027.21	14.40	3,639,641.31	10.92	4,107,751.34	12.09	-	-
C	Industri Pengolahan	1,056,599.51	3.39	1,159,744.18	3.48	1,806,498.60	5.31	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,092.58	0.08	25,496.46	0.08	25,856.07	0.08	-	-
E	Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah	26,424.64	0.08	27,189.27	0.08	25,234.08	0.07	-	-
F	Konstruksi	3,045,243.07	9.76	3,608,997.92	10.83	3,620,127.26	10.65	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor dan Mobil	4,648,288.00	14.91	5,193,082.69	15.58	5,286,572.30	15.55	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan	2,279,701.40	7.31	2,690,996.79	8.08	2,552,412.11	7.51	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	532,285.55	1.71	659,345.41	1.98	668,742.53	1.97	-	-
J	Informasi dan Komunikasi	628,290.90	2.01	634,300.41	1.90	658,265.91	1.94	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,161,516.94	3.72	1,160,188.40	3.48	1,178,642.81	3.47	-	-
L	Real Estate	1,056,563.98	3.39	1,093,285.61	3.28	1,091,289.76	3.21	-	-
M, N	Jasa Perusahaan	6,0467.26	0.19	62,752.64	0.19	59,569.07	0.18	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,874,858.28	6.01	2,127,883.10	6.39	1,894,836.99	5.57	-	-
P	Jasa Pendidikan	1,626,515.54	5.22	1,646,120.39	4.94	1,666,710.51	4.90	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	635,669.01	2.04	654,388.84	1.96	673,024.29	1.98	-	-
R, S, T, U	Jasa Lainnya	711,475.33	2.28	697,813.37	2.09	754,049.85	2.22	-	-
	PDRB	31,185,526.56	100.00	33,322,003.07	100.00	33,989,427.67	100.00	-	-
	PDRB Tanpa Pertambangan Bijih Logam	27671365.32		30,774,929.67		30,986,638.7		-	-

Keterangan: *) : data sangat sementara
Sumber : BPS Provinsi NTB Tahun 2019

Tabel 1.1. menggambarkan bahwa peranan sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor Listrik dan air bersih yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM terhadap pembentukan PDRB di Provinsi NTB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 0,41% pada triwulan III tahun 2019 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2018 dimana sebelumnya 11,68% naik menjadi 12,09%. Sedangkan untuk sub sektor listrik dan gas mengalami kenaikan 0,01% dibandingkan dengan tahun 2018 dimana sebelumnya 0,07% menjadi 0,08%. Untuk lapangan usaha pengadaan air dan pengolahan sampah mengalami penurunan sebesar 0,01% dimana sebelumnya 0,08% pada tahun 2018 menjadi 0,07% pada triwulan III tahun 2019. Secara keseluruhan peran sektor ESDM melalui sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor air bersih untuk tahun 2019 berada di posisi ketiga dibawah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil.

Peranan sub sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peranan sebesar 18,63% pada tahun 2012; 17,49% tahun 2013; 14,39% tahun 2014; 19,07% tahun 2015; 22,18% tahun 2016; 19,45% tahun 2017 dan 11,68% untuk tahun 2018 dan 12,09% (s/d triwulan III 2019). Sedangkan sub sektor listrik dan gas peranannya masih sangat kecil yaitu sebesar 0,51% pada tahun 2012; 0,52% tahun 2013; 0,59% tahun 2014; 0,15% tahun 2015; 0,16% tahun 2016; 0,16% tahun 2017 dan 0,15% Tahun 2018, dan 0,07% (s/d triwulan III 2019) [www.ntb.bps.go.id].

Sektor ESDM mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengisi pembangunan secara khusus di NTB, mengingat potensi ESDM yang dimiliki daerah ini relatif besar, khususnya komoditi tambang mineral dan batuan. Provinsi NTB ini menjadi salah satu daerah penghasil produk mineral di Indonesia, utamanya logam dasar. Pada sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan seperti panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. Untuk itu kedepan potensi tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTB.

B. Landasan Operasional

Dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai hierarki. Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk pelaksanaan program dan kegiatannya memiliki landasan hukum yang jelas untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
20. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
22. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pada beberapa sub urusan pemerintahan. Sebagai turunannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk perangkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan pembentukan Perangkat Daerah yang salah satu Dinas yang dibentuk adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (u) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disebutkan bahwa: “Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”. Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Lebih lanjut disebutkan dalam Lampiran II, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB, menyebutkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2019 didukung oleh 82 personil, yang terdiri dari 11 orang golongan IV, 50 orang golongan III dan 21 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terdiri dari 15 orang pasca sarjana (S2), 35 orang sarjana (S1), 1 orang sarjana muda (D4), 28 orang berpendidikan SLTA, dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2019.

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D4	SLTA	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Eselon III	2	3	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Eselon IV	7	9	0	0	0	0	16	2	14	0	0
Fungsional Tertentu	0	3	0	3	0	0	6	1	5	0	0
Fungsional Umum	4	21	1	25	3	0	54	2	24	28	0
JUMLAH	14	36	1	28	3	0	82	11	43	28	0

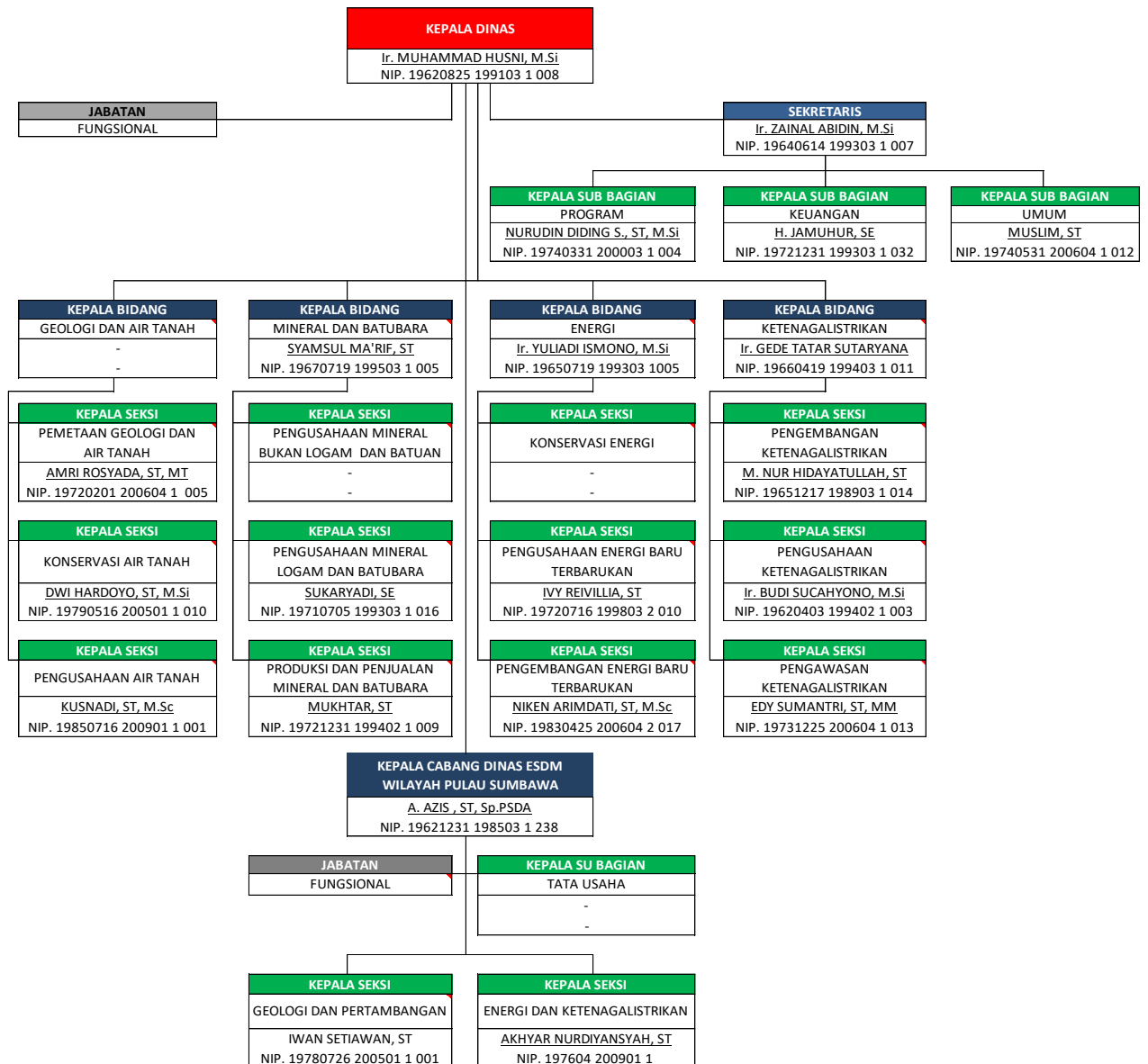
Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2019

Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 50 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
 - Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - Seksi Pengusahaan Air Tanah;
 - Seksi Konservasi Air Tanah.
- Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
 - Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
 - Seksi Produksi, Penjualan Mineral dan Batubara.

- e. Bidang Energi, terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. Cabang Dinas;
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Geologi dan Pertambangan;
 - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
 - Jabatan fungsional Perencana;
 - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Perda 11 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
Daftar Tabel/Grafik
Daftar Gambar
Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Operasional
- C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
- D. Sitematika Penyusunan Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Bab III Akuntabili tas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2019
 - 2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun 2019
 - 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target akhir Renstra 2019-2023
 - 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target nasional
 - 5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi
 - 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran – lampiran

- 1. Rencana Strategis SKPD
- 2. Indikator Kinerja Utama SKPD
- 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- 5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2019
- 6. Laporan Pendukung LAKIP Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaam dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

A. Perencanaan Kinerja

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahunan. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 berfungsi sebagai pedoman Gubernur beserta perangkatnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja

tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan. RPJMD juga memuat strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian target sasaran dalam rencana pembangunan.

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dibidangnya. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan kewenangannya dalam urusan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM telah menyusun Revisi Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Merujuk pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 bahwa sasaran dalam RPJMD menjadi Tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB. Untuk itu tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB adalah “terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin” khususnya terkait dengan akses penduduk terhadap listrik. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) tujuan tersebut adalah Rasio Elektrifikasi (%). Terdapat 2 Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang harus dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB misi tersebut terdiri dari Misi 4 dan Misi 5 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1. Misi yang harus diimplementasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya fungsi ekologi lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Mengoptimalkan pengelolaan geopark	Persentase Geosite yang tertata
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Angka Kemiskinan	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi

Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 menjadi Tujuan dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB Periode 2019-2023 sebagai Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i>	2.17	4.00	6.60	7.20	8.00
2	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan akses listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97.00
3	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih	Cakupan masyarakat yang dapat akses air tanah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih (KK)	2040	255	255	255	425
4	Terwujudnya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (%)	3	3	3	3	3
5	Terwujudnya peningkatan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi	Kontribusi Energi Baru Terbarukan terhadap total bauran energi (%)	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	5.50	6.62	5.96	5.64	5.57

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tujuh tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pelayanan yang akan dilaksanakan Dinas dalam kurun waktu lima tahun 2019-2023 mendatang. Kelima tujuan tersebut masing-masing mempunyai satu sasaran dengan satu indikator. Adapun ketujuh tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan terwujudnya pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan indikator tujuan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Adapun sasarannya adalah meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan indikator berupa persentase pemegang IUP yang melaksanakan *Good Mining Practices*.
2. Tujuan terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik dengan indikator tujuan berupa konsumsi listrik perkapita dalam satuan kWh/Tahun. Adapun sasarannya adalah meningkatnya masyarakat pengguna listrik dengan indikator sasaran Rasio Elektrifikasi dalam satuan (%). Rasio elektrifikasi diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan masih memprioritaskan pembangunan fasilitas pemanfaatan tenaga listrik untuk masyarakat kurang mampu, baik di wilayah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

3. Tujuan terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih dengan indikator tujuan berupa jumlah masyarakat yang terlayani air bersih dalam satuan kepala keluarga (KK). Adapun sasarannya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih yang bersumber dari air tanah dengan indikator tujuan berupa jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih. Sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih berasal dari dua sumber yaitu air permukaan dan air tanah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih yang bersumber dari air tanah sesuai kewenangan yang dimiliki terutama bagi daerah-daerah rawan kekeringan dan/atau daerah-daerah yang memiliki kondisi geologi yang menyulitkan masyarakat untuk memperoleh air bersih yang bersumber dari air tanah.
4. Tujuan terwujudnya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi dengan indikator jumlah kawasan lindung geologi yang dilindungi. Sasaran dari tujuan ini adalah tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi dengan indikator jumlah situs geologi yang dilindungi. Tujuan pengelolaan kawasan lindung geologi ini terkait dengan Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berkontribusi terhadap pengembangan Geowisata yang memanfaatkan keanekaragaman geologi melalui *Geopark Rinjani* dan *Geopark Tambora*.
5. Tujuan terwujudnya peningkatan energi baru terbarukan dalam bauran energi dengan indikator kontribusi energi baru terbarukan terhadap total bauran energi. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dengan indikator kontribusi pembangkit listrik energi baru terbarukan. Tujuan pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025.

Sesuai dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2019 akan menjalankan kebijaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui listrik dan air bersih serta meningkatkan pengelolaan *geopark* maka diusulkan 11 program dengan 41 kegiatan sebagai berikut:

1. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan tersedianya layanan ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan publik, dengan indikator sasaran tersedianya sarana pendukung dan jasa penunjang operasional administrasi dan ketatalaksanaan rumah tangga Perangkat Daerah. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa surat menyurat;

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan;
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
 - j. Penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - k. Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur. Indikator sasaran adalah tersedianya dan terpeliharanya peralatan penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sasarannya diharapkan teralisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pengadaan UPS / Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik, dengan indikator kinerja tersedianya 11 unit peralatan penunjang kerja kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 unit Gedung Kantor, dengan indikator kinerja berfungsinya gedung kantor dinas, bidang dan balai secara optimal sebanyak 2 jenis;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan indikator kinerja berfungsinya secara optimal 24 unit sarana transportasi kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala 27 unit Peralatan Kantor, dengan indikator kinerja berfungsinya peralatan dan fasilitas kerja kantor.
3. ***Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat di bidang energi dan sumberdaya mineral. Indikator sasaran adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, fisik dan disiplin bagi aparatur sehingga tercapai peningkatan kinerja aparatur. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, dengan indikator Terwujudnya 89 aparatur yang tangguh secara mental dan fisik;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan berdasarkan kompetensi untuk jabatan teknis tertentu dan jabatan fungsional untuk satu orang.
4. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan perencanaan urusan ESDM. Indikator sasaran adalah terwujudnya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan Anggaran yang akuntabel, serta dokumen perencanaan yang berkualitas. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator kinerja dilaksanakannya evaluasi pencapaian kinerja kepala SKPD berdasarkan penetapan kinerja sebanyak 1 dokumen;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun, dengan indikator kinerja tersedianya 1 dokumen penyerapan dan realisasi anggaran;
 - c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dengan indikator kinerja tersedianya 3 dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan agenda kebijakan daerah. Dokumen tersebut terdiri dari Rencana Kerja SKPD Tahun 2019, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2019, Rencana Kegiatan dan Anggaran 2020 serta Dokumen SAKIP 2019.
5. ***Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan dan tertibnya pengelolaan aset Barang milik Daerah (BMD), dengan indikator sasaran tersedianya 1 dokumen Laporan Aset BMN/BMD. Sasaran ini diharapkan terealisasi 100%;
6. ***Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan***, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) dengan indikator sasaran tersedianya arahan kebijakan perusahaan pertambangan dan tertib administrasi perizinan di Provinsi NTB, terlaksananya pengawasan usaha pertambangan dan bimbingan bagi pelaku tambang mandiri. Sasaran ini diharapkan terealisasi 2,17% pemegang IUP melaksanakan *good mining practice*, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pendataan hasil produksi di bidang pertambangan, dengan indikator jumlah IUP/IPR yang didata hasil produksinya sebanyak 50 IUP/IPR;
 - b. Pengawasan usaha pertambangan, dengan indikator jumlah IUP/IPR yang diawasi sebanyak 27;
 - c. Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam dengan indikator kinerja jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan 8 izin;
 - d. Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan indikator kinerja jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan 150 izin;.
7. ***Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan***, bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai beberapa tahun kedepan melalui kegiatan:
- a. Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan, dengan indikator jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan 50 izin.
 - b. Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, dengan indikator jumlah rumah tangga yang dipaang listrik murah dan hemat 950 RTS;
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan dengan indikator jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi 50 izin.

8. ***Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan cakupan air bersih melalui pemanfaatan air tanah dan pengendalian pemanfaatan air tanah dan konservasi air tanah melalui kegiatan :
 - a. Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah dengan indikator jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah sebanyak 24 buah;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah dengan indikator jumlah sumur bor yang dibangun sebanyak 24 unit.
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah dengan indikator jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan sebanyak 60 izin;
 - d. Konservasi air tanah dengan indikator jumlah zona konservasi air tanah yang direview 1 zona
9. ***Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral***, dengan sasaran untuk meningkatkan keselarasan perencanaan ESDM. Sasaran ini diharapkan bisa terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersedianya 1 dokumen usulan perencanaan Program/Kegiatan SKPD guna terwujudnya sinergi perencanaan dan implementasi program dan kegiatan bidang pertambangan dan energi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersedianya data dan informasi sektor energi dan sumber daya mineral yang tervalidasi dari waktu ke waktu yang dipublikasi melalui *web* dinas 1 dokumen;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersusunnya 3 dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan SKPD sebagai hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Energi dan Sumber daya Mineral baik internal maupun eksternal.
10. ***Program pencegahan kerusakan lingkungan***, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan kawasan geologidengan indikator kinerja berupa jumlah situs geologi yang dilindungi pada tahun 2019 ini sebanyak 3 situs geologi yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Mitigasi Rawan Bencana Alam Geologi, dengan indikator jumlah orang yang memahami bencana alam geologi dimana sebelumnya ditargetkan 500 orang namun karena adanya pengurangan anggaran berubah target menjadi 0 orang.
 - b. Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi, dengan jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi pada tahun 2019 menjadi sebanyak 200 orang.
11. ***Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi***, bertujuan meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penggunaan energi, dengan indikator kinerja kontribusi pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru

terbarukan dengan target pada tahun 2019 sebesar 5,5%. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari :

- a. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan, dengan indikator kinerja jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang dibangun sebanyak 4 perusahaan.
- b. Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan pada tahun 2019 sebanyak 2 unit.
- c. Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi, dengan indikator jumlah peserta penyuluhan bidang energi dengan target tahun 2019 sebanyak 30 orang.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun 2019 telah menyusun perjanjian kinerja pada awal tahun antara Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan Gubernur sebagai pihak kedua dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Dinas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Dinas. Kemudian Gubernur sebagai pemberi tugas akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2019 yang mendasarkan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan diturunkan ke dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023. Terdapat tiga sasaran strategis yang masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	94,46%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah KK terlayani air bersih	2.040 KK

Adapun Rencana Kinerja yang dilaksanakan di tahun 2019 untuk mendukung Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		a. Terlaksananya jasa surat menyurat	3200 Surat
		b. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis
		c. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis
		d. Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Orang
		e. Tersedianya jasa kebersihan kantor	7 Orang
		f. Tersedianya alat tulis kantor	17 Jenis
		g. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis
		h. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis
		i. Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	2 Jenis
		j. Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	1 Tahun
		k. Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Tahun
2	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	2 Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
		a. Tersedianya peralatan elektronik	11 Unit
		b. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit
		c. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	22 Unit
		d. Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	10 Unit
3	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	3 Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
		a. Terbinanya mental dan fisik aparatur	89 Orang
		b. Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	1 Oarng
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	4 Nilai LKJIP	Nilai B
		a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen
		b. Laporan Keuangan	1 Dokumen
		c. Rencana Kerja SKPD	3 Dokumen
		d. Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 Dokumen
		e. Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 Dokumen
5	Meningkatnya usaha pertambangan yang	5 Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	2,17%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	a. Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	40 Izin
		b. Jumlah IUP/IPR yang diawasi	27 Izin
		c. Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	8 Izin
		d. Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	150 Izin
6	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	6 Rasio Elektrifikasi	94,46%
		a. Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	50 Izin
		b. Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	950 RTS
		c. Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	50 Izin
7	Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	7 Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	2.040 KK
		a. Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	24 Buah
		b. Jumlah sumur bor yang dibangun	24 Unit
		c. Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	60 Izin
		d. Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	1 Zona
8	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ESDM	8 Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	85%
		a. Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen
		b. Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	1 Dokumen
		c. Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	2 Dokumen
9	Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	9 Jumlah situs geologi yang dilindungi	3 Dokumen
		a. Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	-
		b. Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	200 Orang
10	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	10 Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	5,5%
		a. Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	4 Buah
		b. Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Buah
		c. Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	30 Orang

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) diperlukan dukungan program/kegiatan dan anggaran yang menyertainya. Berikut ini disajikan program/kegiatan, target indikator kinerja dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan :

Tabel 2.5. Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Keterangan
3.05.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	888,168,351	Mendukung sasaran strategis nomor 1
3.05.01.01.01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	3200 surat	6,489,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.a
3.05.01.01.02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	161,180,674	Mendukung sasaran strategis nomor 1.b
3.05.01.01.03	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	45,000,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.c
3.05.01.01.07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 orang	141,830,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.d
3.05.01.01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	7 orang	181,219,240	Mendukung sasaran strategis nomor 1.e
3.05.01.01.09	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	17 orang	19,560,350	Mendukung sasaran strategis nomor 1.f
3.05.01.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	15,554,950	Mendukung sasaran strategis nomor 1.g

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Keterangan
3.05.01.01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	3,408,300	Mendukung sasaran strategis nomor 1.h
3.05.01.01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	2 jenis	18,140,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.i
3.05.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselaranan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	1 tahun	114,375,150	Mendukung sasaran strategis nomor 1.j
3.05.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselaranan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 tahun	181,410,687	Mendukung sasaran strategis nomor 1.k
3.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	350,533,536	Mendukung sasaran strategis nomor 2
3.05.01.02.11	Kegiatan Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan elektronik	11 unit	79,300,000	Mendukung sasaran strategis nomor 2.a
3.05.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	73,988,536	Mendukung sasaran strategis nomor 2.b
3.05.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	22 unit	181,670,000	Mendukung sasaran strategis nomor 2.c
3.05.01.02.30	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	10 unit	15,575,000	Mendukung sasaran strategis nomor 2.4
3.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	12,959,600	Mendukung sasaran strategis nomor 3
3.05.01.05.04	Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	89 orang	2,000,000	Mendukung sasaran strategis nomor 3.a
3.05.01.05.05	Kegiatan Peningkatan SDM aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	1 orang	10,959,600	Mendukung sasaran strategis nomor 3.b
3.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP	B	162,963,050	Mendukung sasaran strategis nomor 4
3.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 dok	30,270,550	Mendukung sasaran strategis nomor 4.a
3.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	1 dok	26,671,700	Mendukung sasaran strategis nomor 4.b
3.05.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Rencana Kerja SKPD	3 dok	106,020,800	Mendukung sasaran strategis nomor 4.c
3.05.01.07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 dok	21,822,350	Mendukung sasaran strategis nomor 5
3.05.01.07.01	Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 dok	21,822,350	Mendukung sasaran strategis nomor 5.a
3.05.01.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	2.17%	481,329,700	Mendukung sasaran strategis nomor 6
3.05.01.15.04	Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	40 izin	158,405,000	Mendukung sasaran strategis nomor 6.a
3.05.01.15.10	Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	27 izin	154,485,000	Mendukung sasaran strategis nomor 6.b
3.05.01.15.12	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	8 izin	64,782,500	Mendukung sasaran strategis nomor 6.c
3.05.01.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	150 izin	103,657,200	Mendukung sasaran strategis nomor 6.d
3.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	94.46%	2,417,739,400	Mendukung sasaran strategis nomor 7
3.05.01.17.02	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	50 izin	26,695,100	Mendukung sasaran strategis nomor 7.a
3.05.01.17.03	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	950 RTS	2,364,987,800	Mendukung sasaran strategis nomor 7.b
3.05.01.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	50 izin	26,056,500	Mendukung sasaran strategis nomor 7.c
3.05.01.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	2040 KK	5,921,550,347	Mendukung sasaran strategis nomor 8
3.05.01.18.01	Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	24 buah	5,905,000	Mendukung sasaran strategis nomor 8.a
3.05.01.18.02	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	24 unit	5,881,250,547	Mendukung sasaran strategis nomor 8.b

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Keterangan
3.05.01.18.03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	60 izin	32,494,800	Mendukung sasaran strategis nomor 8.c
3.05.01.18.04	Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	1 zona	1,900,000	Mendukung sasaran strategis nomor 8.d
3.05.01.19	Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	85%	347,173,274	Mendukung sasaran strategis nomor 9
3.05.01.19.01	Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1 dok	118,413,450	Mendukung sasaran strategis nomor 9.a
3.05.01.19.02	Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	1 dok	81,473,024	Mendukung sasaran strategis nomor 9.b
3.05.01.19.03	Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang ESDM	2 dok	147,286,800	Mendukung sasaran strategis nomor 9.c
3.05.01.22	Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3 situs	90,935,500	Mendukung sasaran strategis nomor 10
3.05.01.22.01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	0 orang	3,115,500	Mendukung sasaran strategis nomor 10.a
3.05.01.22.02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	200 Orang	87,820,000	Mendukung sasaran strategis nomor 10.b
3.05.01.24	Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	5.5%	170,051,092	Mendukung sasaran strategis nomor 11
3.05.01.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	4 buah	100,633,942	Mendukung sasaran strategis nomor 11.a
3.05.01.24.02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	2 unit	46,825,000	Mendukung sasaran strategis nomor 11.b
3.05.01.24.03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	30 orang	22,592,150	Mendukung sasaran strategis nomor 11.c

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Ungulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 Terdapat satu sasaran strategis yaitu terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi NTB yaitu :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi .
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dengan indikator kinerja jumlah KK yang terlayani air bersih.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tahun 2019 disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas ESDM Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	94,46%	99,55%	105,39
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah KK yang terlayani air bersih	2.040 KK	2.125 KK	104,17
Rata-rata capaian kinerja				104,78

Adapun capaian kinerja sasaran Renstra berdasarkan target kinerja yang Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019, berdasarkan target dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian %
				Satuan	Volume		
1	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	01. Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
		01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Surat	3200	2248	70.25
		01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	3	3	100
		01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	3	3	100
		01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Orang	12	12	100
		01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	7	7	100
		01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	17	17	100
		01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	10	100
		01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	8	8	100
		01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	Jenis	2	2	100
		01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	1	100
		01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselarasan Program Pemerintah	Tahun	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian %
				Satuan	Volume		
			Provinsi dan Kabupaten/Kota				
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
		02.11 Kegiatan Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan elektronik	Unit	11	11	100
		02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 5.kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1	100
		02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	22	22	100
		02.30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	Unit	10	10	100
3.	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100
		Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Orang	89	89	100
		Kegiatan Peningkatan SDM aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	Orang	1	1	100
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP	Nilai	B	73.51 (B)	100
		06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen	1	1	100
		06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	Dokumen	1	1	100
		06.05 Penyusunan rencana kerja SKPD	Rencana Kerja SKPD	Dokumen	3	3	100
		07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dokumen	1	1	100
		07.01 Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dokumen	1	1	100
5.	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	2.17	2.17	100

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian %
				Satuan	Volume		
		15.04 Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	Jumlah IUP/IPR	40	46	115
		15.10 Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	Jumlah IUP/IPR	27	35	129.63
		15.12 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	Izin	8	18	225
		15.13 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	Izin	150	304	202.67
6.	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	94.46	99.55	105.39
		17.02 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	50	80	160.00
		17.03 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	RTS	950	950	100.00
		17.04 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	Izin	50	57	114.00
7.	Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	KK	2040	2,125	104.17
		18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	Buah	24	24	100.00
		18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	Unit	24	25	104.17
		18.03 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	Izin	60	152	253.33
		18.04 Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	Zona	1	1	100.00
8.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ESDM	19. Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	%	85	100	117.65
		19.01 Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	1	100.00

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian %
				Satuan	Volume		
		19.02 Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	Dokumen	1	1	100.00
		19.03 Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	2	2	100.00
9.	Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	22. Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	3	4	233.33
		22.01 Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	Orang	0	-	0
		22.02 Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	Orang	200	200	100.00
11.	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	24. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	%	5.5	7.35	133.64
		24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	Buah	4	6	150.00
		24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit	2	2	100.00
		24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	Orang	30	35	116.67
Rata-rata capaian program							109.42
Rata-rata capaian kegiatan							110.75

Berdasarkan perhitungan target dan realisasi kinerja tahun 2019 maka dapat dilihat bahwa capaian kinerja program sebesar 119,22% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 110,75%. Capaian tersebut didapat dengan membandingkan capaian masing-masing sasaran yang terdapat dalam program maupun kegiatan terhadap target pada tahun 2019 sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019.

Capaian kinerja program tertinggi terdapat pada sasaran strategis meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dengan capaian sebesar 133,64%. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang baik, dimana peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan terus meningkat dari tahun-ketahun mengikuti kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN. Peningkatan capaian tersebut dihitung dari jumlah kapasitas daya

terpasang PLN sebesar 546,011 MW dimana 40,15 MW bersumber dari energi baru terbarukan.

Realisasi Rasio Elektrifikasi tahun 2019 sebesar 99,55% dari target pada tahun 2019 sebesar 94,46% atau capaiannya sebesar 105,39%. Capaian tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu berupa kinerja Pemerintah Pusat melalui program pembangunan pembangkit dan jaringan listrik 35.000 MW. Berikut ini capaian rasio elektrifikasi Provinsi NTB sampai dengan akhir tahun 2019 :

Tabel 3.3 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RUMAH TANGGA PROVINSI/ KAB/KOTA	RUMAH TANGGA BERLISTRIK				JUMLAH TOTAL	RE Non PLN (%)	RE PLN (%)	RE (%)
			PLN	NON PLN / EBT	LTSHE (2017 dan 2019)	JUMLAH NON PLN				
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4+7	9=7/3* 100	10=4/3* 100	11=8/3* 100
	PROVINSI NTB	1,437,027	1,411,998	15,871	2,709	18,580	1,430,578	1.29	98.26	99.55
1	Kota Mataram	136,215	141,245	-	-	-	141,245	0.00	103.69	103.69
2	Kab. Lombok Barat	199,109	193,065	2,134	321	2,455	195,520	1.23	96.96	98.20
3	Kab. Lombok Tengah	288,373	283,138	2,311	50	2,361	285,499	0.82	98.18	99.00
4	Kab. Lombok Timur	359,167	344,762	1,161	536	1,697	346,459	0.47	95.99	96.46
5	Kab. Lombok Utara	62,435	65,276	2,681	537	3,218	68,494	5.15	104.55	109.70
6	Kab. Sumbawa	121,535	127,330	823	657	1,480	128,810	1.22	104.77	105.99
7	Kab. Sumbawa Barat	38,934	35,146	3,136	-	3,136	38,282	8.05	90.27	98.33
8	Kota Bima	44,154	39,734	1,241	-	1,241	40,975	2.81	89.99	92.80
9	Kab. Bima	124,505	114,399	76	340	416	114,815	0.33	91.88	92.22
10	Kab. Dompu	62,600	67,903	2,308	268	2,576	70,479	4.12	108.47	112.59

Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun 2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKK) RPJMD Tahun 2019-2023 yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2018 dengan tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	75,00%	93,83%	125,11	94,46%	99,55%	105,39
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah KK yang terlayani air bersih	255 KK	255KK	100,00	2.040KK	2.125KK	104,17
Rata-rata capaian kinerja				112,56			104,78

Jika membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun 2019 terdapat sedikit perbedaan terutama dalam penentuan indikator. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018 masih menggunakan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dimana Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 912-

409 tanggal 20 Mei 2014 tentang Penetapan SKPD Pengelola Utama dan Pendukung Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dimana Rasio Elektrifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama. Sedangkan pada realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 Rasio Elektrifikasi tidak masuk dalam Indikator Kinerja Utama namun masuk dalam Indikator kinerja Pembangunan Daerah.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun 2019 terdapat penurunan rata-rata capaian sebesar 7,78% dimana pada tahun 2018 rata-rata capaian sebesar 112,56% dan rata-rata capaian dimana pada tahun 2019 sebesar 104,78%. Penurunan secara signifikan terjadi pada capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi yang pada tahun 2018 capaiannya sebesar 125,11% turun sebanyak 19,72% menjadi sebesar 105,39% pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan adanya faktor perlambatan yang dipengaruhi oleh capaian rasio elektrifikasi mendekati 100%.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019 terhadap Tahun 2018

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian	
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%
Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	01. Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
	01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Surat	1200	3,200	1,229	2248	102.42	70.25
	01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	3	3	3	3	100.00	100.00
	01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	3	3	3	3	100.00	100.00
	01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Orang	11	12	11	12	100.00	100.00
	01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	7	7	7	7	100.00	100.00
	01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	17	17	17	17	100.00	100.00
	01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	10	10	10	100.00	100.00
	01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	9	8	9	8	100.00	100.00
	01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	Jenis	2	2	2	2	100.00	100.00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian	
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%
	01.18 Penyalarsan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	1	1	1	100.00	100.00
	01.20 Penyalarsan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	1	1	1	100.00	100.00
Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100
	02.11 Kegiatan Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan elektronik	Unit	5	11	5	11	100.00	100.00
	02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1	1	1	100.00	100.00
	02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	22	22	22	22	100.00	100.00
	02.30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	Unit	8	10	8	10	100.00	100.00
Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Orang	92	89	92	89	100.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan SDM aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	Orang	0	1	0	1	-	100.00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP	Nilai	B	B	B	B	B	B
	06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dok	1	1	1	1	100.00	100.00
	06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	Dok	1	1	1	1	100.00	100.00
	06.05 Penyusunan rencana kerja SKPD	Rencana Kerja SKPD	Dok	3	3	3	3	100.00	100.00
	07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dok	1	1	1	1	100.00	100.00
	07.01 Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dok	1	1	1	1	100.00	100.00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian	
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	0	2.17	0	2.17	-	100.00
	15.04 Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	Jumlah IUP/IPR	0	40	0	46	-	115.00
	15.10 Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	Jumlah IUP/IPR	0	27	0	35	-	129.63
	15.12 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	Izin	0	8	0	18	-	225.00
	15.13 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	Izin	0	150	235	304	-	202.67
Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	75	94.46	93.83	99.55	125.11	105.39
	17.02 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	0	50	57	80	-	160.00
	17.03 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	RTS	480	950	480	950	100.00	100.00
	17.04 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibangun dan diawasi	Izin	0	50	67	57	-	114.00
Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	KK	255	2040	255	2,125	100.00	104.17
	18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	Buah	3	24	3	24	100.00	100.00
	18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	Unit	3	24	3	25	100.00	104.17
	18.03 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	Izin	0	60	124	152	-	253.33
	18.04 Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	Zona	1	1	1	1	100.00	100.00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian	
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ESDM	19. Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	%	85	85	100	100	117.65	117.65
	19.01 Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dok	1	1	1	1	100.00	100.00
	19.02 Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	Dok	1	1	1	1	100.00	100.00
	19.03 Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dok	2	2	2	2	100.00	100.00
Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	22. Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	0	3	0	7	-	233.33
	22.01 Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	Orang	0	0	0	-	-	-
	22.02 Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	Orang	300	200	300	200	100.00	100.00
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	24. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	%	0	5.5	0	7.35	-	133.64
	24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	Buah	0	4	0	6	-	150.00
	24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit	391	2	391	2	100.00	100.00
	24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	Orang	150	30	150	35	100.00	116.67

Jika dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun 2019 berdasarkan sasaran program dan kegiatan terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan indikator. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018 menggunakan indikator kinerja yang berdasar pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2028, sedangkan realisasi kinerja dan capaian kinerja

tahun 2019 menggunakan indikator kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang didasarkan atas *Balanced Scorecard*. Beberapa perbedaan tersebut terdapat pada beberapa program diantaranya :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan sasaran Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar, sebelumnya pada tahun 2018 menggunakan indikator jumlah dokumen laporan, pada tahun 2019 berubah menjadi persentase pemegang IUP yang melaksanakan *good mining practice*.
- b. Program pencegahan kerusakan lingkungan dengan sasaran tersedianya situs geologi sebagai cagar alam geologi, sebelumnya pada tahun 2018 menggunakan indikator jumlah dokumen laporan, pada tahun 2019 berubah menjadi jumlah situs geologi yang dilindungi.
- c. Program pengembangan dan pemanfaatan energi dengan sasaran meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan, sebelumnya pada tahun 2018 menggunakan indikator jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun dalam satuan unit, pada tahun 2019 berubah menjadi persentase kontribusi pembangkit listrik energi baru terbarukan.

Perbedaan sasaran maupun indikator antara tahun 2018 dengan tahun 2019 menjadikan beberapa program tersebut tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple*. Namun demikian, secara umum realisasi kinerja dan capaian kinerja yang menjadi tanggungjawab utama Dinas ESDM masih memiliki kesamaan antara tahun 2018 dengan tahun 2019 yaitu sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan Indikator Kinerja berupa Rasio Elektrifikasi.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menentukan rencana program kegiatan beserta target yang ditetapkan pada akhir Renstra Tahun 2019-2023. Target tersebut sejalan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat dua sasaran strategis yang masuk dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi dengan target pada akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 97,00%
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dengan indikator jumlah KK yang terlayani air bersih dengan target pada akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 3.400KK

Perbandingan realiasi kinerja tahun 2019 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	Realisasi 2019 thd target akhir renstra
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	94,46%	95,09%	95,73%	96,35%	97,00%	99,55%	102,63%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah KK yang terlayani air bersih	2.040KK	425KK	255KK	255KK	425KK	2.125KK	62,50%
Rata-rata Realisasi capaian 2019 terhadap Target Akhir Renstra								82,57%

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja Rasio Elektrifikasi, target akhir tahun dalam Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 97,00% namun realisasi pada tahun pertama Renstra (2019) sudah melampaui target akhir Renstra Tahun 2019-2023. Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2019 sebesar 99,55% atau 102,63% dari target akhir Renstra 2019-2023.

Penentuan target Rasio Elektrifikasi pada Renstra 2019-2023 didasarkan pada capaian kinerja Rasio Elektrifikasi pada Renstra sebelumnya dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh PLN serta realisasi pembangunan pembangkit dan jaringan listrik PLN. Namun demikian pada tahun 2019 pertumbuhan jumlah pembangkit dan jaringan sangat pesat dan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan listrik. Kondisi demikian mengakibatkan Rasio Elektrifikasi juga meningkat secara signifikan. Peningkatan pasokan listrik di Provinsi NTB didukung oleh program pemerintah pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW sejak tahun 2015 yang sebagian besar baru terealisasi pada tahun 2019.

Sedangkan untuk indikator jumlah KK yang terlayani air bersih target pada akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebanyak 3400KK dapat dilayani air bersih. Realisasi pada tahun 2019 sebanyak 2.125KK terlayani air bersih atau tercapai 62,50% dari target akhir Renstra Tahun 2019-2023.

Untuk mendukung indikator kinerja pembangunan daerah Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan sebelas program dengan sepuluh sasaran strategis melalui sebelas program dan 41 kegiatan. Berikut perbandingan antara capaian program dan kegiatan tahun 2019 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 seperti disajikan dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2019 terhadap target akhir Renstra tahun 2019-2023

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2019	Realisasi 2019 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
1	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat (Buah)	2700	1200	1200	1200	1200	7500	2248	29.97
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jenis)	3	3	3	3	3	3	3	100.00
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	3	3	3	3	3	3	3	100.00
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Orang)	10	10	10	10	10	10	12	120.00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Orang)	4	4	4	4	4	4	7	175.00
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	17	17	17	20	20	20	17	85.00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	9	10	10	10	10	10	10	100.00
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	7	8	8	9	10	10	8	80.00
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat (Jenis)	2	2	2	2	2	2	2	100.00
		Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan daerah	Selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Tahun)	1	1	1	1	1	5	1	20.00

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2019	Realisasi 2019 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selarasnya program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota (Tahun)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan kerja (Unit)	11	5	5	5	2	27	11	40.74
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/kantor (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)	22	22	22	22	22	22	22	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor (Unit)	20	50	50	50	50	50	10	20.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Peningkatan metal dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik (Orang)	92	92	92	92	92	92	89	96.74
		Peningkatan SDM aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya (Orang)	2	16	16	16	16	68	1	1.47
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP	B	B	B	B	BB	BB	B	B
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2019	Realisasi 2019 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD (Dokumen)	3	3	3	3	4	16	3	18.75
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersedianya data aset (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
2	Terlaksananya pengawasan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (%)	2.17	4	6.6	7.2	8	8	2.17	27.13
		Pendataan hasil produksi di bidang pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya (IUP/IPR)	50	60	60	60	60	290	46	15.86
		Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP yang diawasi (IUP)	50	80	65	80	75	350	35	10.00
		Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan (Jumlah Izin)	4	14	18	18	18	72	18	25.00
		Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan (Jumlah Izin)	150	150	75	75	75	525	304	57.90
3	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97	97	99.55	102.63
		Pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan (Jumlah Izin)	50	75	75	80	80	360	80	22.22

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2019	Realisasi 2019 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Pengembangan pemanfaatan bidang ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	950	1650	1550	1550	1550	7250	950	13.10
		Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi (Jumlah Izin)	50	50	75	75	75	325	57	17.54
4	Tersedianya air bersih bagi masyarakat	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan Masyarakat yang Terlayani Air Bersih (KK)	2040	425	255	255	425	3400	2125	62.50
		Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah (buah)	24	5	3	3	5	40	24	60.00
		Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun (Unit)	24	5	3	3	5	40	25	62.50
		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan (Izin)	60	120	80	80	80	420	152	36.19
		Konservasi air tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview (Zona)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
5	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang efektif dan efisien	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral (%)	85	90	93	97	100	100	100	100.00
		Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen usulan program/kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Pendataan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi ESDM (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2019	Realisasi 2019 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi (Dokumen)	3	3	3	3	3	15	3	20.00
6	Tersedianya situs geologi yang terawat dan terlindungi	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	3	3	3	3	3	15	4	26.67
		Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	-	1000	1000	1000	1000	4000	0	-
		Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi (Orang)	700	700	700	700	700	3500	200	5.71
7	Terwujudnya pengelolaan energi daerah sesuai target bauran energi	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit energi baru terbarukan (%)	5.5	6.62	5.96	5,64	5.57	5.57	7.35	131.96
		Pembinaan, pengawaaan dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina	1	1	1	1	1	5	6	120.00
		Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan (Unit)	-	102	102	102	102	408	2	0.49
		Penyuluhan kegiatan bidang energy	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi (Orang)	150	150	150	150	150	750	35	4.67

Realisasi kinerja program terhadap target akhir Resntra Tahun 2019-2023 terutama terhadap program-program prioritas yang mendukung indikator kinerja pembangunan daerah secara umum melebihi target. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan sasaran terlaksananya pengawasan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2,17% pemegang IUP dan realisasinya sebesar 2,17% atau sudah mencapai 27,13% dari target akhir Renstra sebesar 8%, artinya sesuai dengan target pada Renstra.

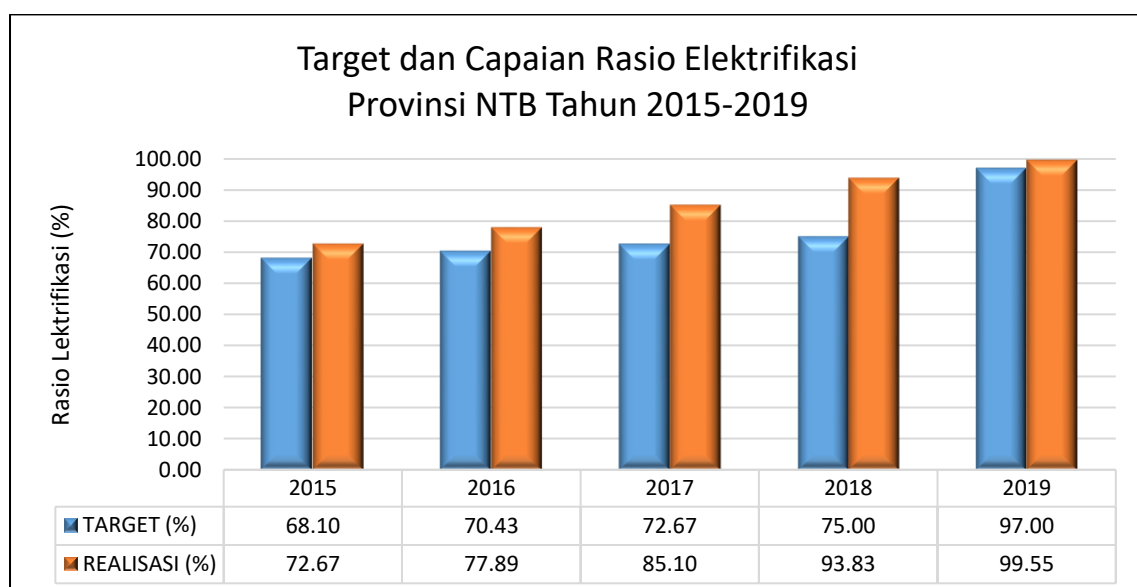
2. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat, indikator Rasio Elektrifikasi ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 94,46% dan pada akhir Renstra sebesar 97,00%. Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2019 sebesar 99,55% atau sudah melebihi 102,63% dari target akhir Renstra.
3. Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah dengan sasaran tersedianya air bersih bagi masyarakat, target indikator kinerja pada tahun 2019 sebanyak 2.040KK dengan target akhir Renstra sebesar 3.400KK. Realisasi pada tahun 2019 sebesar 2.125KK yang artinya sudah 62,50% dari target akhir Renstra.
4. Program pencegahan kerusakan lingkungan dengan sasaran tersedianya situs geologi yang terawat dan terlindungi, target pada tahun 2019 sebanyak 3 situs geologi dan target akhir Renstra sebanyak 15 situs geologi. Realisasi pada tahun 2019 sebanyak 4 situs geologi atau sudah tercapai 26,67% dari target akhir Renstra.
5. Program pengembangan dan pemanfaatan energi dengan sasaran terwujudnya pengelolaan energi daerah sesuai target bauran energi dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Indikator kinerja program tersebut adalah persentase kontribusi pembangkit energi baru terbarukan dengan target pada tahun 2019 sebesar 5,5% dengan target pada akhir Renstra sebesar 5,57%. Namun demikian target tersebut tidak secara linier mengalami peningkatan, hal ini didasarkan kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh PLN, dimana proyeksi target didasarkan atas komposisi pembangunan pembangkit yang didominasi oleh pembangkit yang bersumber dari tenaga fosil.

Secara umum realisasi kinerja tahun 2019 sudah melebihi target pada tahun yang bersangkutan, bahkan ada program yang terkait dengan program strategis Provinsi yang menjadi indikator kinerja utama Dinas telah melampaui 102,63% dari target akhir Renstra Tahun 2019-2023.

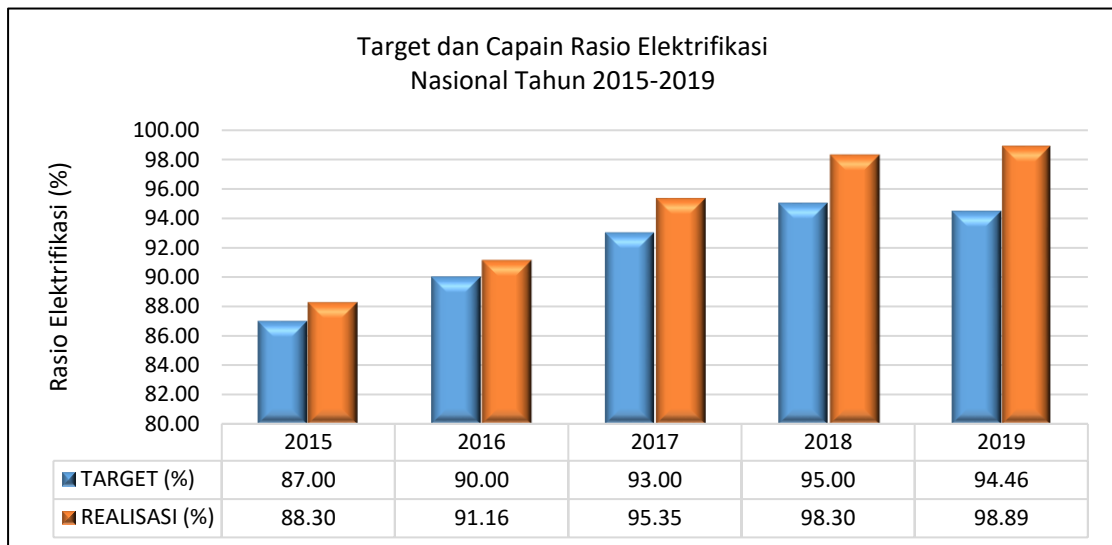
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target nasional.

Secara nasional, Pemerintah Pusat mempunyai kegiatan prioritas pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air yang masuk dalam salah satu isu strategis nasional tahun 2019. Dalam rangka peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dan melaksanakan pengembangan energi baru terbarukan. Untuk menggambarkan seberapa besar kebutuhan listrik telah terpenuhi masyarakat dapat dilihat dari Rasio Elektrifikasi. Rasio elektrifikasi diformulasikan melalui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik dibagi jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Secara nasional target Rasio Elektrifikasi tahun 2019 sebesar 97,00% dengan realisasi 98,89% (capaian 101,95%)

Sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Provinsi NTB mempunyai misi ke 5 RPJMD Tahun 2019-2023 melalui sasara terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan salah satu indikatornya adalah Rasio Elektrifikasi. Target Rasio Elektrifikasi tahun 2019 sebesar 94,46% dengan realisasi sebesar 99,55% (capaian 105,39%). Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan target dan capaian Rasio Elektrifikasi nasional dengan Provinsi NTB dimana capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB lebih tinggi 3,44% dari capaian Rasio Elektrifikasi Nasional.

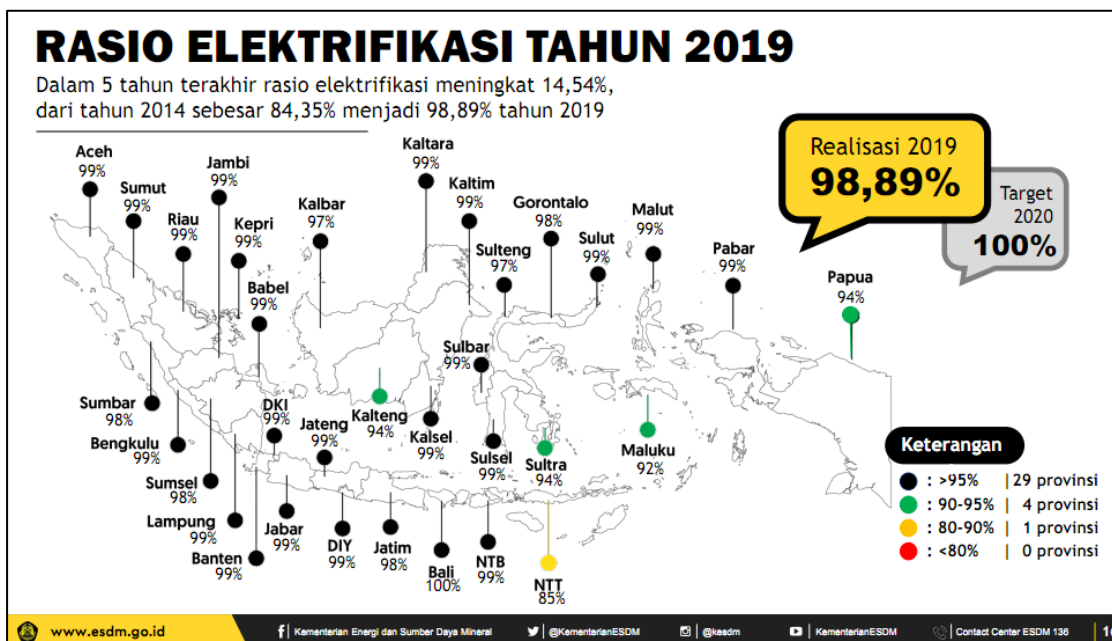


Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2014-2019



Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2014-2019

Kedua grafik menggambarkan bahwa tren peningkatan rasio elektrifikasi Provinsi NTB maupun Nasional dari tahun 2015-2019 selalu meningkat secara linier dan selalu melebihi target. Peningkatan Rasio Elektrifikasi disebabkan oleh meningkatnya pasokan listrik dan perluasan jaringan distribusi secara nasional yang sangat mempengaruhi kondisi kelistrikan di daerah termasuk di Provinsi NTB. Secara nasional Provinsi NTB termasuk ke dalam 29 provinsi dengan Rasio Elektrifikasi diatas 95% dan termasuk ke dalam 22 provinsi dengan Rasio Elektrifikasi diatas 95%.



Gambar 3.3 Sebaran Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2019

5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi NTB. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator keluaran dan hasil yang akan memberikan manfaat dan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan kebijakan program/kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Selama 4 terakhir tahun Provinsi NTB telah berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi dari 72,67% di tahun 2015 menjadi 99,55% pada tahun 2019 atau rata-rata pertahun meningkat sebesar 6,72%.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi NTB sebagian besar disediakan oleh PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik. Dari capaian Rasio Elektrifikasi sebesar 99,55%, sebesar 98,26% diantaranya merupakan cakupan Rasio Elektrifikasi yang berasal dari PLN secara *on grid* dengan menggunakan pembangkit konvensional (PLTU dan PLTD) serta pembangkit Energi Baru Terbarukan. Sedangkan sisanya sebanyak 1,29% berasal dari energi baru terbarukan *off grid* yang pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (PLTS, PLTMH dan PLT Bayu). Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan capaian Rasio Elektrifikasi sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dalam hal ini kebijakan Pemerintah Pusat melalui pembangunan pembangkit dan jaringan listrik 35.000 MW sejak tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PLN.

Untuk meningkatkan cakupan listrik dibutuhkan ketersediaan daya yang memadai dan jaringan yang luas. Usaha penyediaan listrik termasuk kedalam kriteria usaha yang padat teknologi dan padat modal, karenanya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi. PLN sebagai perusahaan penyedia energi listrik jaringannya belum menjangkau semua wilayah Provinsi NTB karena minimnya akses menuju wilayah yang terisolasi. Karenanya untuk melayani kebutuhan energi listrik pada daerah kepulauan dan daerah perbatasan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersumber dari tenaga matahari, tenaga air dan tenaga angin dengan pembiayaan yang berasal dari APBN, Anggaran PLN, APBD, dan swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP).

Adapun Pemerintah Provinsi NTB program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, yang terdiri dari:
 - 1). Pemasangan Listrik Murah dan Hemat (penyambungan listrik gratis) terhadap 950 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan basis data terpadu TNP2K dengan alokasi di Kabupaten Lombok Barat 150 RTS, Kabupaten Lombok Utara 50 RTS, Kabupaten Lombok Tengah 210 RTS dan Kabupaten Lombok Timur 240 RTS, Kota Bima 25 RTS, Kabupaten Bima 60 RTS, Kabupaten Dompu 55 RTS, Kabupaten Sumbawa 60 RTS, Kabupaten Sumbawa Barat 50 RTS. Sampai akhir tahun 2019 telah terealisasi 950 RTS (100%);
 - 2). Pembangunan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 20 unit, dengan lokasi Kota Mataram 5 unit, Lombok Barat 3 unit, Kabuapten Lombok Tengah 2 unit, Kabupaten Lombok Timur 6 unit dan Kabupaten Lombok Utara 2 Unit. Sampai akhir tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 9 unit (100%);
- b. Pembangunan Digester Biogas 4 m³ di Kabupaten Lombok Timur yang terealisasi sebanyak 2 Unit (100%).

Penyediaan tenagalistrik di NTB dikembangkan melalui dua cara yaitu melalui listrik konvensional PT. PLN (*on grid*) dan listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Target peningkatan rasio elektrifikasi sampai dengan akhir Tahun 2019 dicapai melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, Anggaran PT. PLN serta swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sedangkan Peran Pemerintah Daerah lebih sedikit dan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat.

Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga tahun 2021. Secara umum untuk kondisi penyediaan ketenagalistrikan yang bersumber dari listrik PLN untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 sampai tahun 2019 telah terlayani dengan baik dimana hingga akhir tahun 2019 berdasarkan data PT. PLN Wilayah NTB seluruh desa dan kelurahan di NTB sebanyak 996 desa 142 kelurahan telah terlayani jaringan listrik PLN. Sampai dengan akhir tahun 2019 kondisi kelistrikan semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari peningkatan neraca daya tahun 2017-2019 pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Perkembangan Neraca Daya Listrik Sistem NTB 2017-2019

No	Sistem	Daya Mampu Pasok (MW)			Beban Puncak (MW)			Cadangan Daya (MW)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Lombok	272,72	270,75	290,05	216,31	226,17	243,78	56,41	44,58	46,27
2	Sumbawa	41,80	52,00	-	37,34	44,06	-	4,46	7,94	-
3	Bima	41,10	47,55	-	41,09	42,73	-	0,01	4,82	-
4	Tambora	-	-	153,97	-	-	94,74	-	-	59,23
	JUMLAH	355,62	370,30	444,02	294,74	312,96	338,52	60,88	57,34	105,50

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2019

Dilihat dari tabel diatas perkembangan neraca daya dari tahun 2017 ke tahun 2019 semakin meningkat dan peningkatannya semakin tinggi pada tahun 2019 dimana sebagian besar pembangkit yang dibangun mulai beroperasi pada pertengahan sampai akhir tahun 2019. Kondisi demikian juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan PLN yang pada gilirannya akan meningkatkan Rasio Elektrifikasi yang peningkatannya berbanding lurus dengan peningkatan ketersediaan daya, dimana Rasio Elektrifikasi tahun 2017 sebesar 85,10%, tahun 2018 sebesar 93,83% dan tahun 2019 99,55%.

Kontribusi terhadap peningkatan cakupan air bersih

Cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung, pada indikator ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pendukung strategis, bersama Dinas LHK, BPBD dan Dinas Sosial, sementara sebagai SKPD utama pengelolanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Cakupan air bersih merupakan prosentase jumlah penduduk NTB yang dapat menikmati air bersih, angkanya diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk yang dapat menikmati air bersih dibanding dengan jumlah seluruh penduduk NTB dikalikan 100%.

Cakupan air bersih terdiri dari dua macam yaitu cakupan air bersih perkotaan dan cakupan air bersih perdesaan. Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung cakupan air bersih perdesaan dimana untuk tahun 2019 ditargetkan untuk dapat melayani sebanyak 2.040 KK dari 24 sumur bor yang dibangun dan realisasinya sebanyak 25 sumur bor yang dapat melayani 2.125 KK.

Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi cakupan air bersih perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah berupa pembangunan 25 unit sumur bor produksi dengan rincian sebagai berikut:

- Kota Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Salagalas, Lingkungan Nyangget 1 Unit;
- Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari, Desa Dopang 1 Unit;
- Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Tanjung, Desa Sigar Penjalin 1 Unit;
- Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Gangga, Desa Segara Katon 1 Unit;

- e. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra, Desa Moyot 1 Unit;
- f. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra, Desa Sakra 1 Unit;
- g. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun, Desa Semablun Timba Gading 3 Unit;
- h. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgasela, Desa Jurit 1 Unit;
- i. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Masbagik, Desa Lendang Nangka 1 Unit;
- j. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Selebung Ketanga, Dusun Montongsari 1 Unit;
- k. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra Timur, Desa Menceh 1 Unit;
- l. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya, Desa Pringgabaya 1 Unit;
- m. Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Jereweh, Desa Belo 1 Unit;
- n. Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Seteluk, Desa Meraran 1 Unit;
- o. Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Moyo Hulu, Desa Pernek, Universitas Teknologi Sumbawa 1 Unit;
- p. Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Utan, Desa Tengah 1 Unit;
- q. Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas, Desa Juran Alas 1 Unit;
- r. Kabupaten Dompu, Kecamatan Dompu, Desa O'o 1 Unit;
- s. Kabupaten Dompu, Kecamatan Dompu, Kelurahan Kandai Satu 1 Unit;
- t. Kabupaten Dompu, Kecamatan Woja, Kelurahan Simpasai 1 Unit;
- u. Kabupaten Dompu, Kecamatan Manggalewa, Desa Lanci Jaya 1 Unit;
- v. Kabupaten Dompu, Kecamatan Pajo, Desa Timba Lae 1 Unit;
- i. Kota Bima, Kecamatan Asakota, Kelurahan Jati Baru 1 Unit.

Dibandingkan dengan kontribusi capaian cakupan air bersih tahun 2018 sebesar 225 KK atau 0,06%, capaian kontribusi cakupan air bersih tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 2.125 KK atau 0,15%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk penyediaan air bersih melalui pemanfaatan air tanah.

Perkembangan usaha pertambangan mineral dan batubara

Berdasarkan data BPS sampai dengan triwulan III tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,09% meningkat 0,41% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 11,68%. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian untuk tahun 2019 menjadi penyumbang terbesar ketiga terhadap PDRB Provinsi NTB tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan mineral dan batubara. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan

dan perumahan adalah tingginya kebutuhan bahan galian terutama batuan. Eksploitasi terhadap komoditi pertambangan batuan yang memiliki nilai ekonomi serta menjadi bahan baku utama pembangunan menyebabkan munculnya kegiatan penambang baik perorangan maupun kelompok di seluruh Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan, penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Perkembangan kondisi perusahaan mineral logam hingga tahun 2019 dengan terbitnya IUP Khusus Operasi Produksi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan luas lahan IUP OP sebesar 25.000 Ha di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyesuaian Kontrak Karya yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan satu Kontrak Karya milik PT. Sumbawa Timur Mining yang belum disesuaikan menjadi IUP. Sebagai bagian dari kewajiban dalam peningkatan nilai tambah mineral Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Logam Komoditas Tembaga kepada PT. Amman Mineral Industri melalui Keputusan Kepala BKPM Nomor 442/I/IUP/PMDN/2019.

Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2019 sebanyak 358 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 7 Izin Pertambangan Rakyat, yang terdiri dari 21 IUP Mineral Logam 7 IPR Mineral Logam, 4 IUP Mineral Bukan Logam dan 326 IUP Batuan. Untuk IUP Mineral Logam terdiri dari komoditi emas (Au), tembaga (Cu), perak (Ag), Mangan (Mn), Pasir dan bijih besi (Fe), serta timah hitam/galena (Pb). Dimana terdapat 26 IUP yang sudah memasuki masa Operasi Produksi dan 2 IUP yang masih dalam tahap eksplorasi.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Secara umum efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/biaya yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam pengertian lain efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, seperti halnya juga hasil optimal yang

dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Untuk menggambarkan hubungan antara sumber daya baik manusia dan anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Dinas yang optimal berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan jumlah personil yang digunakan, jumlah anggaran yang digunakan dan hasil kinerja berupa Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi dan Indikator Kinerja Pendukung Cakupan Air Bersih yang disajikan dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2019 :

Tabel 3.9 Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2017-2019

No	URAIAN	2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pegawai (orang)	94	94	90	90	82	82
2	Belanja (Rp)	26.347.132.000	24.253.599.631	21.594.060.300	19.463.617.200	19.360.068.700	17.745.343.682
3	Belanja Langsung (Rp)	18.061.481.000	16.647.130.482	13.042.817.600	11.614.758.720	10.953.436.200	10.214.494.461
4	Belanja Tidak Langsung (Rp)	8.345.651.000	7.606.469.149	8.209.306.000	7.516.363.440	8.406.632.500	7.530.849.1221
5	Realiasi Keuangan (%)	100	92,05	100	90,13	100	91,66
6	Realisasi Fisik (%)	100	100	100	100	100	98,66
7	Indikator Kinerja Utama						
	- Target RE (%)	72,6	85,10	75,00	93,83	94,46	99,55
	- Capaian (%)		117,10		125,11		105,39
8	Indikator Kinerja Pendukung						
	- Cakupan Air Bersih (KK)	765 KK	765 KK	255 KK	255 KK	2.040	2.125
	- Capaian (%)	100	100	100	100	100	104,17

Dari gambaran tabel 3.9 diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Penggunaan sumber daya manusia dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami tren penurunan dari 94 pegawai di 2017 menjadi 89 pegawai di akhir tahun 2019, rata-rata penurunan pegawai selama tiga tahun sebesar 6,56%. Penurunan jumlah pegawai disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke SKPD lain. Dari jumlah 82 personil mempunyai komposisi yang terdiri dari 11 orang golongan IV (13,41%), 50 orang golongan III (60,98%) dan 21 orang golongan II (25,61%). Berdasarkan pendidikan terdiri dari 15 orang pasca sarjana (S2) sebanyak 18,29%, 35 orang sarjana (S1) sebanyak 42,68%, 1 orang sarjana muda (D4) sebanyak 1,22%, 28 orang berpendidikan SLTA sebanyak 34,15%, dan 3 orang berpendidikan SLTP sebanyak 3,66%.
- Penggunaan sumber daya anggaran, seperti halnya penggunaan sumber daya manusia juga mengalami penurunan dari anggaran Rp. 26.347.132.000,- pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar Rp. 19.360.068.700,-. Kondisi fiskal provinsi NTB semakin tahun semakin meingkat, namun demikian kebijakan anggaran terhadap belanja untuk memenuhi kebutuhan sektor ESDM semakin menurun, hal ini disebabkan oleh

adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang sebelumnya memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil, sejak tahun 2019 sudah tidak lagi memberikan DAK tersebut.

- c. Realisasi penyerapan anggaran mengalami fluktuasi yang tidak linier yang berkisar antara 90,13% hingga 92,05%, perkembangan realisasi keuangan sangat dipengaruhi oleh rencana penganggaran dan penawaran pekerjaan yang dilelang, khususnya untuk belanja fisik infrastruktur ESDM yang mempunyai nilai anggaran yang besar.
- d. Perkembangan capaian indikator kinerja utama dinas mengalami kenaikan secara signifikan, terutama peningkatan Rasio Elektrifikasi dimana pada tahun 2018 sebesar 85,10% menjadi 99,55% pada tahun 2019. Namun demikian jika dilihat dari capaian yang membandingkan antara target dengan realisasi mengalami fluktuasi yang tidak linier.

Dari uraian penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah sumber daya berupa pegawai dan anggaran dinas terhadap kinerja dinas. Ada banyak faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas faktor tersebut diantaranya adalah :

- a. Kinerja stakeholder lain yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi seperti : PLN, Sektor penyedia energi listrik swasta (*Independent Power Producer*) dan kebijakan Pemerintah Pusat.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan air secara mandiri.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Diperlukan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal. Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugas Dinas, Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan 11 Program prioritas yang di turunkan menjadi 41 kegiatan. Sebanyak 5 program diantaranya merupakan program yang bersifat rutin untuk menunjang operasional kantor dan 6 program lainnya merupakan program strategis yang mendukung kinerja Dinas. Ke 6 program tersebut adalah :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- c. Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah;
- d. Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- e. Program pencegahan kerusakan lingkungan;
- f. Program pengembangan dan pemanfaatan energi.

Program-program tersebut adalah program yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral di Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB.

Dinas ESDM Provinsi NTB mempunyai tugas utama untuk mencapai target indikator kinerja sasaran RPJMD tahun 2019-2023 berupa Rasio Elektrifikasi. Target Rasio Elektrifikasi tahun 2019 sebesar 94,46% telah tercapai menjadi 99,55% dengan capaian 105,39%. Peningkatan rasio elektrifikasi diintervensi melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan program pengembangan dan pemanfaatan energi. Pelaksanaan program tersebut untuk menjangkau akses masyarakat yang belum mendapatkan layanan listrik.

Pada akhir tahun 2018 diperkirakan masih terdapat 6,17 % Penduduk NTB yang belum menikmati layanan listrik, untuk melakukan percepatan layanan listrik terutama pada Kabupaten/Kota yang memiliki ratio elektrifikasi dibawah 90% Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan program pemasangan listrik murah dan hemat secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin berdasarkan data TNP2K PLN yang tinggal di daerah sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum mendapatkan akses listrik secara mandiri. Bagi masyarakat yang berada pada daerah yang belum akan dijangkau oleh jaringan listrik PLN dalam waktu dekat, diintervensi dengan pemasangan listrik yang bersumber dari energi terbarukan.

Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan program pengembangan dan pemanfaatan energi juga diselaraskan dengan program-program lainnya yang mendukung peningkatan capaian kinerja secara internal. Secara eksternal pelaksanaan program-program Dinas ESDM juga dikolaborasikan dengan program Pemerintah Pusat dan swasta diantaranya :

- a. Program listrik perdesaan oleh pemerintah pusat melalui yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan Anggaran APBN dan APLN.
- b. Program pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW.
- c. Program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu.
- d. Program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh asosiasi pegawai Kementerian ESDM.

Sedangkan untuk indikator kinerja terkait dengan cakupan air bersih dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah melalui pembangunan sumur bor dalam. Untuk program yang mendukung pencapaian cakupan air bersih perhitungan capaian kinerja Dinas belum memperhitungkan dengan kinerja SKPD penanggungjawab utama maupaun kontribusi anggaran selain pemerintah. Pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah dikolaborasikan dengan program penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan, serta program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap penyediaan air bersih masyarakat seperti Planet Water, Islamic Relief dan lain-lain.

B. Realisasi Anggaran

Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dan masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Berikut ini adalah realisasi belanja Dinas EDM Provinsi NTB yang bersumber dari APBD sebagaimana disajikan dalam tabel 3.10 dibawah ini

Tabel 3.10 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung melalui APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan SKPD

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
2.03.01	BELANJA			19.360.068.700	17.745.343.682	91,66	98,66
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Satuan	1	8.406.632.500	7.530.849.221	89,58	100,00
5.1.1	Belanja Pegawai	Tahun	1	8.406.632.500	7.530.849.221	89,58	100,00
	Gaji dan Tunjangan	Bulan	14	5.943.680.950	5.580.342.608	93,89	100,00
	Tambahan Penghasilan PNS	Bulan	13	2.462.951.550	1.950.506.613	79,19	100,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	Satuan		10.665.827.840	9.944.907.256	93,24	97,56
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	710.919.991	681.810.358	95,91	100,00
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	3.200	5.636.000	3.621.900	64,26	100,00
5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	3	131.380.674	107.734.001	82,00	100,00
5.2.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	43.000.000	42.975.000	99,94	100,00
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Orang	12	129.950.000	129.380.000	99,56	100,00
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang	7	101.605.280	101.604.080	100,00	100,00
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	17	14.704.050	14.697.700	99,96	100,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	12.768.350	12.761.700	99,95	100,00
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	8	2.123.900	2.123.900	100,00	100,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis	2	17.640.000	17.630.000	99,94	100,00
5.2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	107.801.050	105.157.977	97,55	100,00
5.2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	144.310.687	144.124.100	99,87	100,00
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satuan	45	328.383.536	313.811.218	95,56	100,00
5.2.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Unit	11	79.300.000	75.640.500	95,39	100,00
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Unit	1	73.988.536	73.041.000	98,72	100,00
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	22	164.770.000	155.129.718	94,15	100,00
5.2.02.30	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10	10.325.000	10.000.000	96,85	100,00
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	90	12.959.600	5.809.600	44,83	100,00
5.2.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Orang	89	2.000.000	-	00,00	100,00
5.2.05.20	Peningkatan SDM Aparatur	Orang	1	10.959.600	5.809.600	53,01	100,00
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	5	162.963.050	136.099.200	83,52	100,00
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	30.270.550	30.269.900	100,00	100,00

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
5.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	26.671.700	26.250.900	98,42	100,00
5.2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen	3	106.020.800	79.578.400	75,06	100,00
5.2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	1	21.822.350	20.919.100	95,86	100,00
5.2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Dokumen	1	21.822.350	20.919.100	95,86	100,00
5.2.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Satuan	225	481.329.700	465.881.340	96,79	100,00
5.2.15.04	Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	IUP/IPR	40	158.405.000	148.152.400	93,53	100,00
5.2.15.10	Pengawasan Usaha Pertambangan	IUP/IPR	27	154.485.000	154.065.340	99,73	100,00
5.2.15.12	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Izin	8	64.782.500	61.516.400	94,96	100,00
5.2.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	150	103.657.200	102.147.200	98,54	100,00
5.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Satuan	1050	2.417.739.400	2.276.814.400	94,17	100,00
5.2.17.02	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Izin	50	26.695.100	26.695.100	100,00	100,00
5.2.17.03	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	RTS	950	2.364.987.800	2.224.122.800	94,04	100,00
5.2.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Izin	50	26.056.500	25.996.500	99,77	100,00
5.2.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Satuan	109	5.921.550.347	5.460.593.099	92,22	96,41
5.2.18.01	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah	Buah	24	5.905.000	5.905.000	100,00	100,00
5.2.18.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah	Unit	24	5.881.250.547	5.420.293.299	92,16	96,39
5.2.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah	Izin	60	32.494.800	32.494.800	100,00	100,00
5.2.18.04	Konservasi Air Tanah	Zona	1	1.900.000	1.900.000	100,00	100,00
5.2.19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	5	347.173.274	341.718.431	98,43	100,00
5.2.19.01	Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	118.413.450	117.927.900	99,59	100,00
5.2.19.02	Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	81.473.024	80.399.500	98,68	100,00
5.2.19.03	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	3	147.286.800	143.391.031	97,35	100,00
5.2.22	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Satuan	400	90.935.500	74.054.636	81,44	100,00
5.2.22.01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Orang	-	3.115.500	3.115.500	100,00	100,00
5.2.22.02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Orang	400	87.820.000	70.939.236	80,78	100,00
5.2.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Satuan	36	170.051.092	167.395.874	98,44	100,00
5.2.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Buah	4	100.633.942	100.633.942	100,00	100,00
5.2.24.02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Unit	2	46.825.000	44.887.632	95,86	100,00
5.2.24.03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Orang	30	22.592.150	21.874.300	96,82	100,00
Balai ESDM Wilayah Sumbawa							

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
5.2	BELANJA LANGSUNG			287.608.360	269.587.205	93,73	100,00
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	177.248.360	162.259.780	91,54	100,00
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	500	853.000	778.000	91,21	100,00
5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	29.800.000	17.497.070	58,72	100,00
5.2.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tahun	1	11.880.000	11.880.000	100,00	100,00
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang	3	79.613.960	77.452.460	97,29	100,00
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	24	4.856.300	4.723.900	97,27	100,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	2	2.786.600	2.773.250	99,52	100,00
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	2	1.284.400	1.270.000	98,88	100,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis	2	500.000	500.000	100,00	100,00
5.2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	6.574.100	6.505.100	98,95	100,00
5.2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	37.100.000	36.880.000	99,41	100,00
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	11	22.150.000	20.222.998	91,30	100,00
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	2	16.900.000	15.787.998	93,42	100,00
5.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	5.250.000	4.435.000	84,48	100,00
5.2.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Izin	20	30.812.500	30.480.500	98,92	100,00
5.2.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	20	30.812.500	30.480.500	98,92	100,00
5.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Izin	10	15.500.000	15.193.927	98,03	100,00
5.2.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Izin	10	15.500.000	15.193.927	98,03	100,00
5.2.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Izin	14	20.500.000	20.190.000	98,49	100,00
5.2.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah	Izin	14	20.500.000	20.190.000	98,49	100,00
5.2.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Usaha	4	21.397.500	21.240.000	99,26	100,00
5.2.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Usaha	4	21.397.500	21.240.000	99,26	100,00
Rata-Rata Realisasi Keuangan						91,66	
Rata-Rata Realisasi Fisik							98,66
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN						91,66	

Realisasi keuangan sebesar 91,66% (Rp. 17.745.343.682,00) dan realisasi fisik sebesar 98,66%. Realisasi keuangan berasal dari Belanja Langsung sebesar Rp. 10.214.494.461,00 dan dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.530.849.221,00, Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1.614.725.018,50 berasal dari sisa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 875.783.279, dan sisa Belanja Langsung sebesar

Rp. 738.941.793,50. Sisa Belanja Langsung berasal dari hasil efisiensi kegiatan yang dilaksanakan melalui lelang, perjalanan dinas, honor dan kegiatan lainnya.

Rendahnya realisasi fisik disebabkan oleh adanya satu buah sumur bor yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan masa kontrak, hal tersebut dikarenakan adanya kendala teknis terkait dengan kondisi geohidrologi yang terjadi diluar perkiraan dalam perencanaan. Hal tersebut berdampak pada realisasi fisik yang hanya tercapai 98,66% dan realisasi keuangan 91,66%.

Selain capaian indikator kinerja sasaran RPJMD sebesar 104,78%, terdapat tiga indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program dan indikator kinerja keuangan yang tertuang dalam target Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2019 menunjukkan nilai prosentase pencapaian akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 110,75%;
2. Pencapaian Kinerja Program sebesar 109,42%;
3. Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 91,66%.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas ESDM Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas ESDM Provinsi NTB.

Dari hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LKjIP Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2019, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2019 dapat dicapai dan terlampaui. Indikator Kinerja Sasaran yang telah diperjanjikan dengan capaian: Realisasi Rasio Elektrifikasi 99,55% dari target 94,46% atau capaiannya sebesar 105,39%, dan indikator kinerja sasaran pendukung berupa Cakupan Air Bersih Realisasinya 2.125 KK dari target 2.040 KK atau capaiannya sebesar 104,17%. Kedua capaian indikator kinerja sasaran dan pendukung tadi bila dirata-ratakan, maka diperoleh nilai 104,78%.

Dari indikator sasaran yang ada tahun 2019, yang terdiri dari: 10 indikator program (109,42%), 41 indikator kegiatan (110,75%) dan juga indikator capaian keuangan (91,66%), sehingga diperoleh rata-rata sebesar 103,94%. Bila seluruh capaian indikator sasaran Renstra 2019-2023 digabungkan dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2019-2023 sebesar 104,78%, diperoleh rata-rata nilai sebesar 104,36%.

Selain keberhasilan tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Permasalahan tersebut timbul terkait dengan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dan sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan. Permasalahan bidang ketenagalistrikan walaupun Rasio Elektrifikasi di Provinsi NTB sudah mencapai 99,55% artinya bahwa masih ada 0,45% atau sekitar 6.449 rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap listrik, permasalahan lainnya adalah berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PLN sebanyak 19.514 rumah tangga mendapatkan listrik dengan cara menyalur dari tetangganya yang memiliki meter listrik PLN. Terhadap permasalahan tersebut diperlukan pendataan lebih rinci terkait dengan jumlah rumah tangga yang akan diintervensi melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan PLN, BPS,

Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) ditempuh untuk mengatasi kebutuhan energi pada daerah-daerah yang memiliki akses konektivitas yang sulit seperti daerah kepulauan dan daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur EBT untuk saat ini masih sangat mahal dibandingkan dengan infrastruktur energi dan listrik yang menggunakan energi konvensional (fosil), sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan EBT. Selain pembangunannya yang mahal fasilitas EBT tersebut tidak memerlukan biaya bahan bakar dalam mengoperasikannya dan umur pakai yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Melalui program prioritas tersebut telah banyak dibangun infrastruktur EBT di seluruh pelosok tanah air termasuk di Provinsi NTB yang didanai melalui APBN. Banyak diantara fasilitas EBT yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Sejak tahun 2019 sumber anggaran Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk membiayai pengembangan EBT sudah tidak ada lagi, diperlukan alternatif sumber dana lainnya selain DAK yang dapat digunakan seperti pemanfaatan dana desa.

Beberapa hal tersebut diatas tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dapat terwujud.

Kiranya LKjIP Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja. LKjIP ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 yang akan datang.

LAMPIRAN

LKjIP TAHUN 2019

Lampiran - 1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i>	2.17	4.00	6.60	7.20	8.00
2	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan akses listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97.00
3	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih	Cakupan masyarakat yang dapat akses air tanah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih (KK)	2040	255	255	255	425
4	Terwujudnya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (%)	3	3	3	3	3
5	Terwujudnya peningkatan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi	Kontribusi Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya kapasitas pembangkit	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	5.50	6.62	5.96	5.64	5.57

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		terhadap total bauran energi (%)	listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan						

Lampiran - 2

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kases masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	94,46%
Meningkatnya masyarakat akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah KK/jiwa penduduk yang menikmati air bersih	2.040 KK

Mataram, 28 Desember 2018
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD / Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran : 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Terlaksananya jasa surat menyurat	3200 Surat
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis
		Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Orang
		Tersedianya jasa kebersihan kantor	7 Orang
		Tersedianya alat tulis kantor	17 Jenis
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis
		Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	2 Jenis
		Keselarsan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	1 Tahun
		Keselarsan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Tahun
2	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
		Tersedianya peralatan elektronik	11 Unit

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	22 Unit
		Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	10 Unit
3	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
		Terbinanya mental dan fisik aparatur	89 Orang
		Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	1 Oarngr
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	Nilai LKjIP	Nilai B
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen
		Laporan Keuangan	1 Dokumen
		Rencana Kerja SKPD	3 Dokumen
		Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 Dokumen
		Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 Dokumen
5	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	2,17%
		Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	40 Izin
		Jumlah IUP/IPR yang diawasi	27 Izin
		Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	8 Izin
		Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	150 Izin
6	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	Rasio Elektrifikasi	94,46%
		Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	50 Izin
		Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	950 RTS
		Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	50 Izin
7	Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	2.040 KK
		Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	24 Buah
		Jumlah sumur bor yang dibangun	24 Unit
		Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	60 Izin
		Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	1 Zona

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ESDM	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	85%
		Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen
		Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	2 Dokumen
9	Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3 Dokumen
		Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	-
		Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	200 Orang
10	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	5,5%
		Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	4 Buah
		Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Buah
		Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	30 Orang

Mataram, 28 Desember 2018
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Cakupan Layanan Listrik	Rasio Elektrifikasi (Cakupan Listrik)	94,46 %
2.	Mendukung Terwujudnya Peningkatan Cakupan Air Bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memadai	2040 KK

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp. 2.482.749.000	Sumber dana APBD, mendukung Misi 4 dan 5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran Rasio Elektrifikasi dan Cakupan Air Bersih
2.	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Rp. 191.868.500	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp. 641.017.500	
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Rp. 6.765.961.200	
5.	Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Rp. 128.537.700	

Mataram,

2019

Pihak Kedua,
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 5

PENGUKURAN DAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SKPD/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Tahun Anggaran : 2019

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	01. Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	888,168,351	100	844,070,138	100	95.03
		01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Surat	3,200	6,489,000	100	4,399,900	100	67.81
		01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	3	161,180,674	3	125,231,071	100	77.70
		01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	3	45,000,000	3	44,975,000	100	99.94
		01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Orang	12	141,830,000	12	141,260,000	100	99.60
		01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	7	181,219,240	7	179,056,540	100	98.81

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
		01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	17	19,560,350	17	19,421,600	100	99.29
		01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	15,554,950	10	15,534,950	100	99.87
		01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	8	3,408,300	8	3,393,900	100	99.58
		01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	Jenis	2	18,140,000	2	18,130,000	100	99.94
		01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	114,375,150	1	111,663,077	100	97.63
		01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	181,410,687	1	181,004,100	100	99.78
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	350,533,536	100	334,034,216	100	95.29

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
		02.11 Kegiatan Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan elektronik	Unit	11	79,300,000	11	75,640,500	100	95.39
		02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	73,988,536	1	73,041,000	100	98.72
		02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	22	181,670,000	22	170,917,716	100	94.08
		02.30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	Unit	10	15,575,000	10	14,435,000	100	92.68
3.	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	12,959,600	100	5,809,600	1000	44.83
		Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Orang	89	2,000,000	89	0	100	0.00
		Kegiatan Peningkatan SDM aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	Orang	1	10,959,600	1	5,809,600	100	53.01
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP	Nilai	B	162,963,050	B	136,099,200	100	83.52

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
		06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dok	1	30,270,550	1	30,269,900	100	100
		06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	Dok	1	26,671,700	1	26,250,900	100	98.42
		06.05 Penyusunan rencana kerja SKPD	Rencana Kerja SKPD	Dok	3	106,020,800	3	79,578,400	100	75.06
		07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dok	1	21,822,350	1	20,919,100	100	95.86
		07.01 Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dok	1	21,822,350	1	20,919,100	100	95.86
5.	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	2.17	481,329,700	2.17	465,881,340	100	96.79
		15.04 Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	Jumlah IUP/IPR	40	158,405,000	46	148,152,400	115.00	93.53
		15.10 Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	Jumlah IUP/IPR	27	154,485,000	35	154,065,340	129.63	99.73
		15.12 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam	Izin	8	64,782,500	18	61,516,400	225.00	94.96

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
			yang diterbitkan							
		15.13 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	Izin	150	103,657,200	304	102,147,200	202.67	98.54
6.	Rasio Elektrifikasi	17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	94.46	2,417,739,400	99.55	2,276,814,400	105.39	94.17
		17.02 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	50	26,695,100	80	26,695,100	160.00	100.00
		17.03 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	RTS	950	2,364,987,800	950	2,224,122,800	100.00	94.04
		17.04 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibangun dan diawasi	Izin	50	26,056,500	57	25,996,500	114.00	99.77
7.	Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang	18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	KK	2040	5,921,550,347	2.125	5,460,593,099	104.17	92.22

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
	bersumber dari air tanah	18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	Buah	24	5,905,000	24	5,905,000	100	100.00
		18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	Unit	24	5,881,250,547	25	5,420,293,299	104.17	92.16
		18.03 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	Izin	60	32,494,800	152	32,494,800	253.33	100.00
		18.04 Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	Zona	1	1,900,000	1	1,900,000	100.00	100.00
8.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ESDM	19. Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	%	85	347,173,274	100	341,718,431	117.65	98.43
		19.01 Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dok	1	118,413,450	1	117,927,900	100.00	99.59

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
		19.02 Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	Dok	1	81,473,024	1	80,399,500	100.00	98.68
		19.03 Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dok	2	147,286,800	2	143,391,031	100.00	97.35
9.	Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	22. Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	3	90,935,500	4	74,054,636	133.33	81.44
		22.01 Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	Orang	0	3,115,500	-	3,115,500	-	100.00
		22.02 Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	Orang	200	87,820,000	200	70,939,236	100	80.78
10	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber	24. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	%	5.5	170,051,092	7.35	167,395,874	133.64	98.44

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
					KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN
	energi baru terbarukan	24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	Buah	4	100,633,942	6	100,633,942	150.00	100.00
		24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit	2	46,825,000	2	44,887,632	100	95.86
		24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	Orang	30	22,592,150	35	21,874,300	116.67	96.82

Mataram, 21 Januari 2020
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 6

LAPORAN PENDUKUNG LKJP/LAKIP TAHUN 2019

- a. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 Terhadap RPJMD Tahun 2019-2023
SKPD/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Target Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%	11	12	13	14	15=13/11*100%	16=14/12*100	17
Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	01. Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	624,247,600.00	888,168,351	571,266,146.00	844,070,138	100	95.03	100
	01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Surat	1200	3,200	1,229	2248	102.42	70.25	7,640,000.00	6,489,000	3,748,000.00	4,399,900	100	67.81	100
	01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	3	3	3	3	100.00	100.00	165,016,000.00	161,180,674	119,785,154.00	125,231,071	100	77.70	100
	01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	3	3	3	3	100.00	100.00	12,800,000.00	45,000,000	12,800,000.00	44,975,000	100	99.94	100
	01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Orang	11	12	11	12	100.00	100.00	138,251,000.00	141,830,000	137,441,800.00	141,260,000	100	99.60	100
	01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	7	7	7	7	100.00	100.00	165,420,000.00	181,219,240	161,091,000.00	179,056,540	100	98.81	100
	01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	17	17	17	17	100.00	100.00	28,324,600.00	19,560,350	28,320,600.00	19,421,600	100	99.29	100
	01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	10	10	10	100.00	100.00	26,428,000.00	15,554,950	26,366,000.00	15,534,950	100	99.87	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Target Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%	11	12	13	14	15=13/11*100%	16=14/12*100%	17
	01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	9	8	9	8	100.00	100.00	9,066,900.00	3,408,300	9,052,900.00	3,393,900	100	99.58	100
	01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	Jenis	2	2	2	2	100.00	100.00	26,000,000.00	18,140,000	21,025,500.00	18,130,000	100	99.94	100
	01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselaranan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	1	1	1	100.00	100.00	81,100,560.00	114,375,150	80,517,300.00	111,663,077	100	97.63	100
	01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselaranan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	1	1	1	100.00	100.00	139,059,240.00	181,410,687	137,701,635.00	181,004,100	100	99.78	100
Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	263,570,000.00	350,533,536	242,020,311.00	334,034,216	100	95.29	100
	02.11 Kegiatan Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan elektronik	Unit	5	11	5	11	100.00	100.00	14,000,000.00	79,300,000	13,612,200.00	75,640,500	100	95.39	100
	02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1	1	1	100.00	100.00	10,300,000.00	73,988,536	10,217,138.00	73,041,000	100	98.72	100
	02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	22	22	22	22	100.00	100.00	243,270,000.00	181,670,000	221,467,735.00	170,917,716	100	94.08	100
	02.30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	Unit	8	10	8	10	100.00	100.00	11,000,000.00	15,575,000	10,995,000.00	14,435,000	100	92.68	100
Terwujudnya pelayanan administrasi	05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	9,643,200.00	12,959,600	5,850,000.00	5,809,600	1000	44.83	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Target Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%	11	12	13	14	15=13/11*100%	16=14/12*100%	17
ESDM yang profesional	Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Orang	92	89	92	89	100.00	100.00	4,000,000.00	2,000,000	1,000,000.00	0	100	0.00	100
	Kegiatan Peningkatan SDM aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	Orang	0	1	0	1	-	100.00	5,643,200.00	10,959,600	4,850,000.00	5,809,600	100	53.01	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP	Nilai	B	B	B	B	B	B	161,586,000.00	162,963,050	159,170,800.00	136,099,200	100	83.52	100
	06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen	1	1	1	1	100.00	100.00	31,644,900.00	30,270,550	30,644,400.00	30,269,900	100	100	100
	06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	Dokumen	1	1	1	1	100.00	100.00	26,685,100.00	26,671,700	25,846,300.00	26,250,900	100	98.42	100
	06.05 Penyusunan rencana kerja SKPD	Rencana Kerja SKPD	Dokumen	3	3	3	3	100.00	100.00	103,256,000.00	106,020,800	102,680,100.00	79,578,400	100	75.06	100
	07. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dokumen	1	1	1	1	100.00	100.00	20,954,000.00	21,822,350	20,951,800.00	20,919,100	100	95.86	100
	07.01 Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	Dokumen	1	1	1	1	100.00	100.00	20,954,000.00	21,822,350	20,951,800.00	20,919,100	100	95.86	100
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	0	2.17	0	2.17	-	100.00	250,000,000.00	481,329,700	249,620,635.00	465,881,340	100	96.79	100
	15.04 Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	Jumlah IUP/IPR	0	40	0	46	-	115.00	-	158,405,000	-	148,152,400	115.00	93.53	100
	15.10 Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	Jumlah IUP/IPR	0	27	0	35	-	129.63	250,000,000.00	154,485,000	249,620,635.00	154,065,340	129.63	99.73	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Target Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%	11	12	13	14	15=13/11*100%	16=14/12*100%	17
	15.12 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	Izin	0	8	0	18	-	225.00	-	64,782,500	-	61,516,400	225.00	94.96	100
	15.13 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	Izin	0	150	235	304	-	202.67	-	103,657,200	-	102,147,200	202.67	98.54	100
Rasio Elektrifikasi	17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	75	94.46	93.83	99.55	125.11	105.39	1,394,660,000.00	2,417,739,400	1,217,908,659.00	2,276,814,400	105.39	94.17	100
	17.02 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	0	50	57	80	-	160.00	90,000,000.00	26,695,100	88,876,750.00	26,695,100	160.00	100.00	100
	17.03 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	RTS	480	950	480	950	100.00	100.00	1,224,160,000.00	2,364,987,800	1,079,034,909.00	2,224,122,800	100.00	94.04	100
	17.04 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	Izin	0	50	67	57	-	114.00	80,500,000.00	26,056,500	49,997,000.00	25,996,500	114.00	99.77	100
Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	KK	255	2040	255	2,125	100.00	104.17	1,148,765,000.00	5,921,550,347	915,915,741.00	5,460,593,099	104.17	92.22	100
	18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	Buah	3	24	3	24	100.00	100.00	50,000,000.00	5,905,000	46,046,641.00	5,905,000	100	100.00	100
	18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	Unit	3	24	3	25	100.00	104.17	983,765,000.00	5,881,250,547	756,938,700.00	5,420,293,299	104.17	92.16	100
	18. 03 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	Izin	0	60	124	152	-	253.33	115,000,000.00	32,494,800	112,930,400.00	32,494,800	253.33	100.00	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Target Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%	11	12	13	14	15=13/11*100%	16=14/12*100%	17
	18.04 Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	Zona	1	1	1	1	100.00	100.00	-	1,900,000	-	1,900,000	100.00	100.00	100
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ESDM	19. Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	%	85	85	100	100	117.65	117.65	301,741,800.00	347,173,274	288,238,659.00	341,718,431	117.65	98.43	100
	19.01 Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	1	1	1	100.00	100.00	100,000,000.00	118,413,450	99,148,153.00	117,927,900	100.00	99.59	100
	19.02 Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	Dokumen	1	1	1	1	100.00	100.00	50,922,800.00	81,473,024	40,074,600.00	80,399,500	100.00	98.68	100
	19.03 Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	2	2	2	2	100.00	100.00	150,819,000.00	147,286,800	149,015,906.00	143,391,031	100.00	97.35	100
Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	22. Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	0	3	0	7	-	233.33	363,350,000.00	90,935,500	361,074,393.00	74,054,636	233.33	81.44	100
	22.01 Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	Orang	0	0	0	-	-	-	50,000,000.00	3,115,500	49,984,400.00	3,115,500	-	100.00	100
	22.02 Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	Orang	300	200	300	200	100.00	100.00	313,350,000.00	87,820,000	311,089,993.00	70,939,236	100	80.78	100
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang	24. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	%	0	5.5	0	7.35	-	133.64		170,051,092		167,395,874	133.64	98.44	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Target Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		%Fisik
				2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	2018	2019	2018	2019	Terhadap 2018	Terhadap Target 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=6/8*100%	11	12	13	14	15=13/11*100%	16=14/12*100%	17
bersumber energi baru terbarukan	24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	Buah	0	4	0	6	-	150.00	67,078,000.00	100,633,942	56,875,000.00	100,633,942	150.00	100.00	100
	24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit	391	2	391	2	100.00	100.00	8,329,000,000.00	46,825,000	7,389,670,056.00	44,887,632	100	95.86	100
	24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	Orang	150	30	150	35	100.00	116.67	82,000,000.00	22,592,150	81,783,155.00	21,874,300	116.67	96.82	100

b. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019 di Provinsi NTB sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah untuk mendukung Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran pada Misi 5 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran berupa Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi juga masuk dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB nomor 71 dengan target pada tahun 2019 sebesar 94,46%. Adapun indikator lainnya merupakan dukungan peningkatan cakupan air bersih yang menjadi IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dimana Dinas ESDM Provinsi NTB mempunyai target dalam mendukung cakupan air bersih sebanyak 2.040 KK pada tahun 2019.

Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2019 sebesar 99,55% dari target tahun 2019 sebesar 94,46% dengan capaian sebesar 105,39%. Capaian rasio elektrifikasi tersebut banyak didukung oleh kinerja PLN dalam meningkatkan kapasitas pembangkit dan jaringan melalui program Pemerintah Pusat pembangunan 35.000 MW di seluruh Indonesia. Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 akan dibangun tambahan pembangkit listrik sebesar 500 MW di Provinsi NTB baik yang dibangun oleh PLN maupun oleh Independent Power Producer (IPP). Hal tersebut menjadikan kebutuhan listrik masyarakat dapat dipenuhi dan rasio elektrifikasi meningkat secara signifikan. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses terhadap listrik.

Rasio elektrifikasi tahun 2019 sebesar 99,55% artinya masih 0,45% rumah tangga belum mendapatkan layanan listrik atau sebanyak 6.449 rumah tangga. Namun demikian berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PLN sampai dengan tahun 2019 masih ada 19.514 rumah tangga mendapatkan listrik belum secara mandiri dengan cara menyambung dari tetangga. Kondisi demikian perlu ditangani agar setiap rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan listriknya secara mandiri memiliki kWh meter sendiri.

c. Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah dalam rangka Pencapaian Target RPJMD

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
Masih ada sekitar 0,45% (6.449 rumah tangga) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik, terutama <i>Remote Area</i> yang sulit terjangkau PLN, sebanyak 19.514 rumah tangga masih mendapatkan layanan listrik dengan cara menyalur dari tetangga.	<p>a. Sejak tahun 2012 telah dilaksanakan pemasangan listrik murah dan hemat (listrik gratis) bagi masyarakat tidak mampu (miskin) melalui pembiayaan APBN dan APBD. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 25.277 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 1,76% dari jumlah Rumah Tangga di Provinsi NTB. Kedepan, kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder Pemerintah maupun swasta melalui CSR.</p> <p>b. Untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan Listrik PLN, pemerintah akan berupaya membuka akses listrik dengan mengembangkan Energi Terbarukan, dengan dukungan pembiayaan baik APBD maupun APBN.</p>	Terkait masih adanya 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik dengan cara menyalur, akan dilakukan pendataan lebih rinci dengan melibatkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT, PLN, BPS, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Cacatan Sipil untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Banyak diantara fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset	Sejak tahun 2016 sampai 2018 Pemerintah Provinsi mulai mendapatkan alokasi DAK bidang Energi Skala Kecil. Dalam berbagai forum pertemuan telah disampaikan agar DAK tersebut juga dapat digunakan untuk	Mendorong Pemerintah Pusat menginventarisasi aset infrastruktur energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGLATKAN KINERJA SKPD
yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.	revitalisasi infrastruktur energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat.	Mendorong langkah-langkah percepatan penyerahan infrastruktur energi baru terbarukan kepada daerah, agar daerah dapat mengalokasikan anggaran perbaikan. Sejak tahun 2019 Pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran bagi pengembangan energi terbarukan, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah kembali akan memberikan alokasi anggaran untuk pengembangan energi skala kecil. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan dana desa bagi pengembangan EBT khususnya pada desa-desa yang mengandalkan kebutuhan energinya bersumber dari EBT.

- d. Prestasi SKPD di tingkat Provinsi.
Untuk tahun 2019 tidak ada prestasi yang didapatkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.

Mataram, 21 Januari 2019
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008



Dinas Esdm Ntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id